



Kementerian
Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi

LAPORAN KINERJA 2025

Biro Perencanaan dan
Kerja Sama
Sekretariat Jenderal



KATA PENGANTAR



Ade Faisal, S.T., M.Sc.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud komitmen kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendukung Sekretariat Jenderal yang bertanggungjawab kepada Kementerian. Laporan Kinerja

(LAKIN) ini menyajikan data secara transparan dan terukur capaian kinerja yang telah kami raih selama satu tahun terakhir, sebagai bentuk dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian kinerja yang kami raih merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi dan sinergi seluruh pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Namun demikian, kami menyadari bahwa perlu adanya perbaikan berkelanjutan. Laporan Kinerja ini (LAKIN) diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga dapat sebagai instrumen evaluasi internal untuk mengidentifikasi hal yang masih kurang optimal dan dapat merumuskan langkah perbaikan tindak lanjut di masa yang akan datang. Semoga dengan adanya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja kami dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama tahun 2025.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

Jakarta, 24 Januari 2026

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama



Ade Faisal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Gambaran Umum	13
B. Dasar Hukum.....	15
C. Tugas dan Fungsi.....	16
D. Struktur Organisasi.....	17
E. Isu Strategis dan Peran Strategis.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis.....	20
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah (Matriks Kinerja /Renstra).....	21
C. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	22
D. Program Prioritas	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja.....	25
B. Realisasi Anggaran	73
1 Capaian Anggaran	73
2 Efisiensi Anggaran	75
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>	76
1 Inovasi.....	77
2 Penghargaan	78
3 Program <i>Crosscutting/ Collaborative</i>	81
BAB IV PENUTUP.....	85
Lampiran	87
A Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	87



1 Perjanjian Kinerja Awal.....	87
2 Perjanjian Kinerja Akhir	89
B Pengukuran Kinerja	91
1 Triwulan I	91
2 Triwulan II.....	92
3 Triwulan III.....	93
4 Triwulan IV	94
C Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi.....	14
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	15
Tabel 2. 1 Sasaran Program, Indikator dan Target Rencana Kinerja Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Kerja Sama.....	21
Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator dan Target PK dan Renstra Biro Perencanaan dan Kerja Sama	22
Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	23
Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Akhir Sekretariat Jenderal Tahun 2025	23
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025	26
Tabel 3. 2 Tabel Capaian SK Tersedianya Layanan Prima Dalam Kerja Sama	29
Tabel 3. 3 Negara yang telah bekerja sama di bidang pendidikan Tinggi.....	30
Tabel 3. 4 Agenda Regional dan Multilateral	31
Tabel 3. 5 Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan Mitra	32
Tabel 3. 6 Dokumen PDLN Terproses Tahun 2024 dan 2025 di lingkungan Kemdiktisaintek35	
Tabel 3. 7 Daftar Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiktisaintek dengan Ajuan PDLN Terbanyak Tahun 2024 dan 2025	36
Tabel 3. 8 Daftar Negara dengan Ajuan PDLN Terbanyak Tahun 2024 dan 2025	36
Tabel 3. 9 Nilai Interpretasi SAKIP	44
Tabel 3. 10 Capaian Persentase Satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	45
Tabel 3. 11 Capaian Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama.....	51
Tabel 3. 12 Capaian Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama 2021-2025	53
Tabel 3. 13 Indikator penilaian NKA.....	57
Tabel 3. 14 Capaian Nilai Kinerja Anggaran	57
Tabel 3. 15 Kategori Nilai Kinerja Anggaran.....	62
Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan NKA atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	63
Tabel 3. 17 Predikat dan Nilai Periode 2022-2024 Kemdikbudristek	63
Tabel 3. 18 Indikator Penilaian IPPN	69
Tabel 3. 19 Kategori Indeks Perencanaan dan Penganggaran	69
Tabel 3. 20 Capaian IKK Persentase Satuan Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik.....	70
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025	73
Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025	74
Tabel 3. 23 Penyerapan Anggaran Pada Tiap Indikator Kinerja Kegiatan Pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama.....	74
Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja	75



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Perencanaan dan Kerja Sama	14
Grafik 1. 2 Komposisi Generasi Pegawai Biro Perencanaan dan Kerja Sama	14
Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerja Sama	18
Gambar 1. 2 Bagan Tim Manajemen Biro Perencanaan dan Kerja Sama.....	18
Gambar 3. 1 ASEAN Ministerial Round Table.....	40
Gambar 3. 2 20th SOM-ED dan 15th SOM-ED+3.....	40
Gambar 3. 3 Kunjungan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk tindak lanjut pembahasan Nota Kesepahaman antara Kemdiktisaintek dengan BSI	40
Gambar 3. 4 11th BRICS Education Ministers Meeting	41
Gambar 3. 5 Penandatanganan Nota Kesepahaman Adendum antara Kemdiktisaintek dengan Kemensos.....	41
Gambar 3. 6 Pelaksanaan JWG Indonesia – United Kingdom.....	41
Gambar 3. 7 Courtesy Call Mendiktisaintek dan Duta Besar Bulgaria	42
Gambar 3. 8 Courtesy Call Wamendiktisaintek dan Parlemen Aljazair.....	42
Gambar 3. 9 Reviu Definisi Operasional Kemdiktisaintek.....	48
Gambar 3. 10 Pelaksanaan Reviu Renstra Sekretariat Jenderal.....	48
Gambar 3. 11 Peningkatan Kompetensi SAKIP di Lingkungan Kemdiktisaintek	49
Gambar 3. 12 Rekonsiliasi Anggaran di Lingkungan Biro Perencanaan dan Kerja Sama	54
Gambar 3. 13 Penyusunan Matrik Peran Hasil di Lingkungan Biro Perencanaan dan Kerja Sama	55
Gambar 3. 14 Rapat koordinasi NKA Kemdiktisaintek	60
Gambar 3. 15 Rapat koordinasi SBSN di Lingkungan Kemdiktisaintek.....	60
Gambar 3. 16 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 DIPA 693318 Sekretariat Jenderal pada Aplikasi Monev Kemenkeu per 15 Januari 2026.....	66
Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi SBSN di Lingkungan Kemdiktisaintek II.....	66
Gambar 3. 18	66
Gambar 3. 19 Pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran satuan kerja di Payakumbuh, Sumatera Barat.....	67
Gambar 3. 20 Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 di Payakumbuh.....	72
Gambar 3. 21 Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026	72
Gambar 3. 22 Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 di Payakumbuh II	73



IKHTISAR EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025 memuat capaian terhadap enam sasaran kegiatan, diukur melalui enam Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025. Rata-rata capaian keenam indikator tersebut mencapai 113,4 persen, dengan rincian empat indikator tercapai diatas 100 persen, dan dua indikator di bawah 100 persen. Capaian ini didukung juga dengan anggaran sebesar Rp332.044.510.000, dengan realisasi hingga 14 Januari 2026 mencapai Rp324.002.399.199 atau 97,58 persen. Namun, terdapat blokir anggaran Rp3.544.614.000 yang tidak dapat dibuka kembali untuk direalisasikan.

Uraian lebih lanjut mengenai tingkat ketercapaian masing-masing sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya akan disajikan secara lebih rinci pada BAB III laporan kinerja ini. Secara umum, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama tahun 2025 adalah sebagai berikut:



SK 1 Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

IKK 1.1 Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral

50 Persen	59.7 Persen	119,5 Persen	
Target	Realisasi	Capaian	

SK 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

IKK 2.1 Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A

81 Persen	76.25 Persen	94 Persen	
Target	Realisasi	Capaian	

SK 3 Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal

IKK 3.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama

BB Predikat	A Predikat	150 Persen	
Target	Realisasi	Capaian	

SK 4 Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran

IKK 4.1 Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik

83 Persen	90.85 Persen	109,45 Persen	
Target	Realisasi	Capaian	

SK 5 Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal

IKK 5.1 Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal

Baik Kategori	Sangat Baik Kategori	120 Persen	
Target	Realisasi	Capaian	

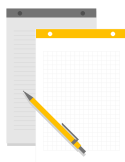
SK 6 Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek

IKK 6.1 Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik

100 Persen	87 Persen	87 Persen	
Target	Realisasi	Capaian	

Kendala atau Permasalahan Umum

Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2025 antara lain yaitu:



Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa mitra membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang dari definisi dan alur program yang akan dilaksanakan.

Penyusunan MoU membutuhkan waktu yang lama karena koordinasi dan ketersediaan waktu Mitra dalam hal ini adalah Kemlu (Direktorat Kawasan dan Direktorat HPSB) serta Mitra Asing (juga memerlukan koordinasi diantara Kemlu, Kedutaan Besar serta Kementerian Teknis).

Operator Perguruan Tinggi belum familiar dengan perubahan alur PDLN.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kelompok Kerja Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri perlu pembaharuan.

Perubahan Nomenklatur Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara mengakibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus membuat Rencana Strategis Terlambat dari Kementerian yang sudah ada sebelumnya.

Terdapat indikator kinerja baru yang belum terdapat data baseline yang sesuai dengan baseline tahun 2024, dan data baseline tersebut tidak dapat diakses secara umum.

Budaya kinerja belum terbangun dengan baik, hal ini terlihat dari Satker melakukan proses SAKIP berdasarkan surat pemberitahuan.

Rendahnya deviasi halaman III DIPA pada nilai IKPA yang mempengaruhi NKA, akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Masih terdapat tagging IKSS yang belum tepat pada aplikasi SAKTI sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Adanya restrukturisasi Kementerian yang sebelumnya Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 Kementerian. Renja K/L dan DIPA Awal TA 2025 belum mencerminkan kondisi dan kebutuhan anggaran Kemdiktisaintek.

Perubahan kebijakan Kemdiktisaintek dengan mengacu pada Rencana Strategis Kemdiktisaintek yang telah disahkan sehingga terdapat beberapa hal yang ditindaklanjuti di perencanaan dan penganggaran.

Langkah Antisipasi

Beberapa upaya langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam mengatasi kendala atau permasalahan umum yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2025 antara lain yaitu:



Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan mitra untuk mempercepat proses pembuatan perjanjian kerja sama.

Melakukan pengawasan dan monitoring penyusunan MoU secara disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mensosialisasikan peraturan PDLN terbaru guna memperluas pengetahuan operator satker serta peraturan PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan PMK Nomor 164/PMK.05/2015PMK Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Melakukan koordinasi terkait pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kelompok Kerja Kerja Sama Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri

Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk mendapatkan data baseline terbaru sebagai tolak ukur penetapan target kinerja

Melakukan proses peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM SAKIP dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait

koordinasi dengan DJPB Kemenkeu dan diberikan dispensasi nilai pada indikator Deviasi Halaman III DIPA untuk Triwulan I TA 2025

Melakukan pemetaan RO SBK yang belum tertagging dan berkoordinasi dengan DSP DJA untuk melakukan tagging di aplikasi Monev Kemenkeu

Pengusulan Revisi Informasi Kinerja dalam rangka penyesuaian kebijakan Kemdiktisaintek

Penyesuaian program dan anggaran baik target maupun alokasi anggaran berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Rencana Strategis Kemdiktisaintek 2025-2029 dan peraturan yang relevan



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

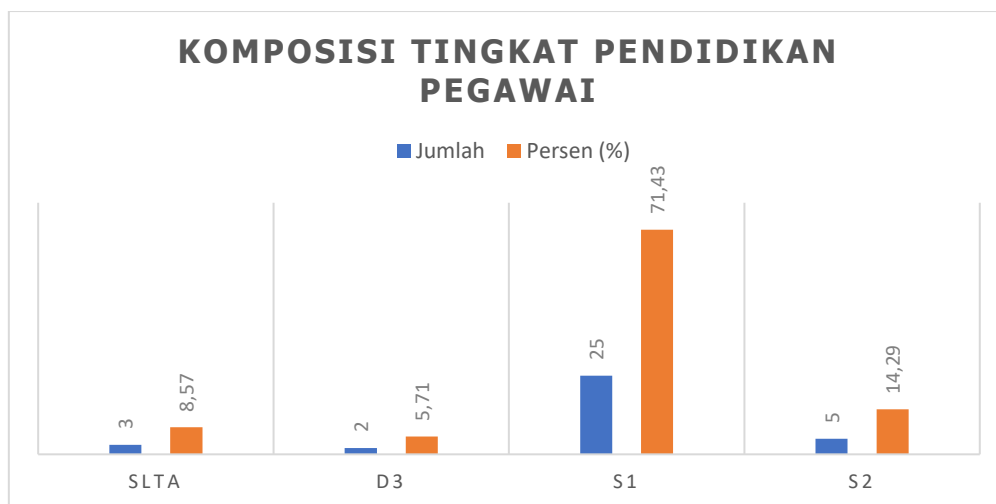
A. Gambaran Umum

Biro Perencanaan dan Kerja Sama merupakan satuan kerja setingkat Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Biro Perencanaan dan Kerja Sama merupakan unit kerja baru, yang mulai beroperasi secara optimal pada tanggal 3 Februari 2025. Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah mengalami pergantian pimpinan dari Kepala Biro pertama sejak awal tahun hingga bulan September, kemudian dilanjutkan oleh Plt. Kepala Biro sejak bulan Oktober hingga Desember minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan Kepala Biro yang Baru hingga saat ini.

Biro Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2025, Biro Perencanaan dan Kerja Sama didukung oleh 35 orang pegawai yang terdiri dari 21 orang pegawai laki-laki (60%) dan 14 orang pegawai perempuan (40%). Berdasarkan komposisi sumber daya manusia Biro Perencanaan dan Kerja Sama, berdasarkan tingkat pendidikan dan status pegawai dan generasi sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
SLTA	3	8,57
D3	2	5,71
S1	25	71,43
S2	5	14,29

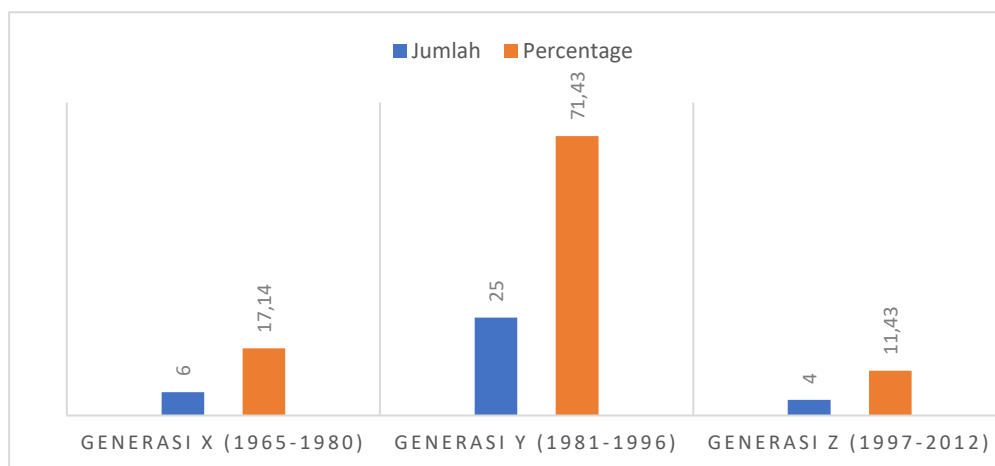


Grafik 1. 1 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Berdasarkan dari sisi level tingkat pendidikan, di dominasi oleh tingkat pendidikan S1 dengan jumlah pegawai 25 orang atau sebesar 71,43%.

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi

Level Generasi	Jumlah	Persen (%)
Generasi X (1965-1980)	6	17,14
Generasi Y (1981-1996)	25	71,43
Generasi Z (1997-2012)	4	11,43

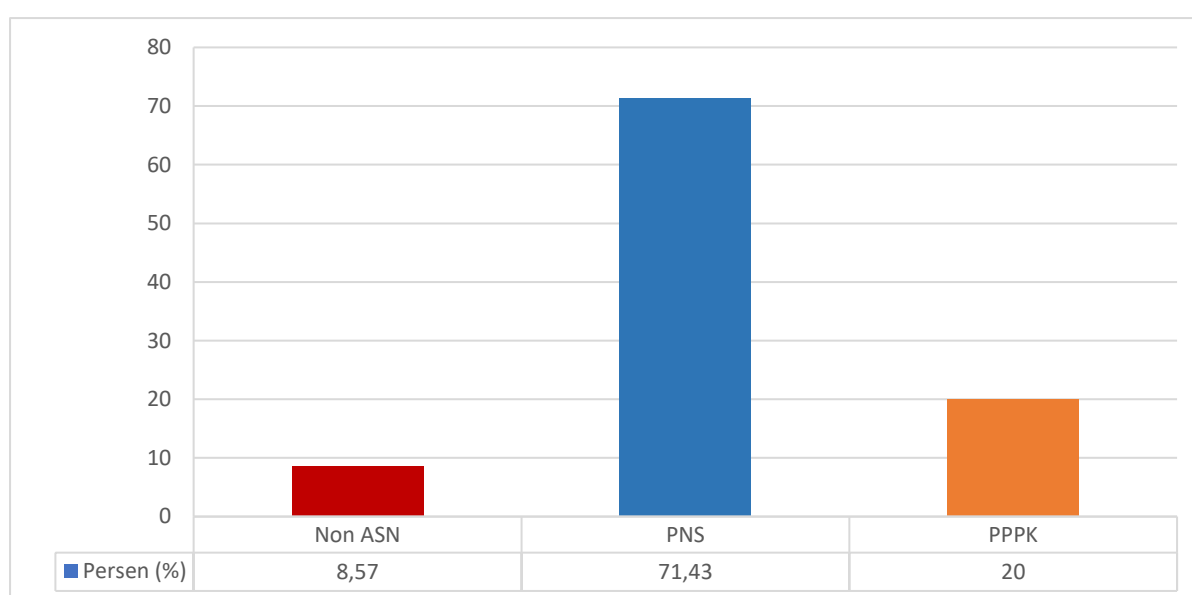


Grafik 1. 2 Komposisi Generasi Pegawai Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Berdasarkan dari sisi level generasi, di dominasi oleh generasi Y dengan jumlah pegawai 25 orang atau sebesar 71,43%.

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan	Persen (%)
Non ASN	2	1	3	8,57
PNS	13	12	25	71,43
PPPK	6	1	7	20,00
Jumlah	21	14	35	100



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama

B. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan ringkasan yang disusun secara singkat namun komprehensif mengenai capaian kinerja yang mengacu pada rencana kerja yang telah ditetapkan, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah dalam pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu, aspek utama dalam penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja, serta penyajian hasil analisis pengukuran kinerja secara memadai dan transparan. Berikut ini beberapa dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan yaitu:

- 1** Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- 2** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4** Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 5** Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- 6** Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- 7** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 10** Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 11** Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi



Tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, dan penyiapan pembinaan akuntabilitas kinerja dan administrasi kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Permendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
2	Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
3	Pelaksanaan sinkronisasi program pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi
4	Pelaksanaan penyiapan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
5	Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
6	Fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
7	Pelaksanaan penyiapan pembinaan kerja sama di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi
8	Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi
9	Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam negeri
10	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan kerja sama dan
11	Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro

D. Struktur Organisasi

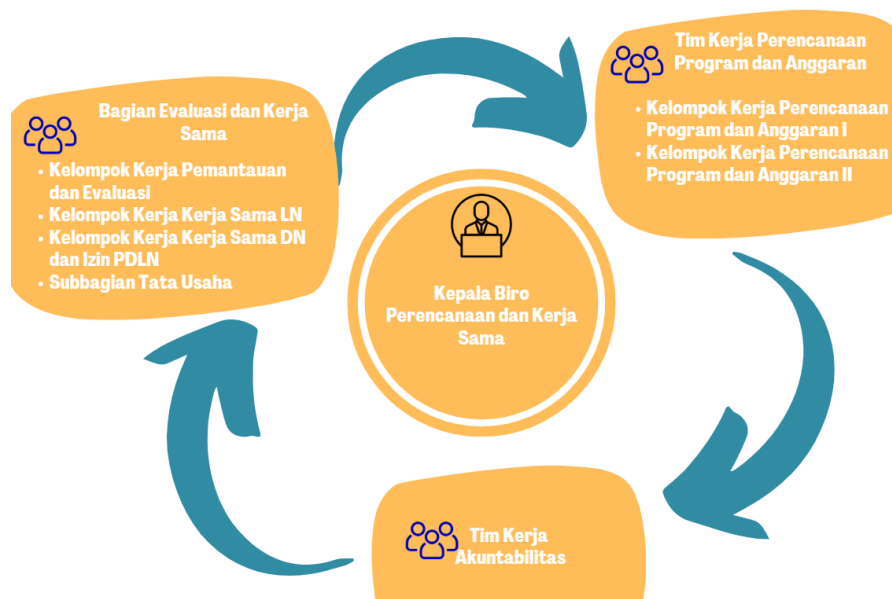
Sesuai dengan pasal 15 Permendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, struktur organisasi Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas Bagian Evaluasi dan Kerja Sama dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, dengan bagan sebagai berikut:

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Sesuai dengan Pasal 16, Bagian Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Kementerian, pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama serta pelaksanaan kerja sama luar negeri. Dalam mendukung percepatan peningkatan kinerja, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama membentuk tim kerja sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 003/A1/KPT.KP/2025 tentang Perubahan Tim Kerja Biro Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Bagan Tim Manajemen Biro Perencanaan dan Kerja Sama

E. Isu Strategis dan Peran Strategis

Isu Strategis	1 Optimalisasi tindak lanjut nota kesepahaman dengan mitra dalam negeri serta pelayanan PDLN yang prima. 	2 Proses perencanaan program dan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dan hasil 
	3 Optimalisasi kolaborasi kerjasama dengan mitra luar negeri yang mendukung program dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku 	4 Pemenuhan Tunjangan Kinerja Dosen ASN dan Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai 
	5 Intervensi program (seperti KIP Kuliah, Revitalisasi Lab, dan Bantuan Sarpras) berkorelasi positif dengan peningkatan kompetensi lulusan (<i>employability</i>) dan relevansi dengan dunia kerja (<i>link and match</i>) 	6 Memastikan tidak adanya <i>missing link</i> antara proses perencanaan secara strategis di setiap tingkatannya pasca-transformasi organisasi. 
	7 Relaksasi Buka Blokir Anggaran Efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 Kemdiktisaintek TA 2025 dari Rp14,3 Triliun yang terblokir efisiensi pada awal tahun, saat ini pagu blokir efisiensi menjadi Rp723 Miliar. Telah dilakukan pembukaan blokir/relaksasi sebesar Rp13,6 Triliun atau 95% 	

1 Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan strategis yang selaras dengan kebijakan nasional.	2 Meningkatkan kualitas indikator kinerja yang relevan, terstruktur, dan berdampak	Peran Strategis
3 Memastikan keberlanjutan implementasi MoU/PKS melalui monitoring dan evaluasi yang sistematis	4 Mewujudkan integrasi sistem data perencanaan, kinerja, dan kerja sama dalam satu ekosistem data terpadu	
5 Meningkatkan efektivitas tata kelola internal melalui prosedur kerja yang efisien dan akuntabel.		





BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis



B. Rencana Kinerja Jangka Menengah (Matriks Kinerja /Renstra)

Tabel 2. 1 Sasaran Program, Indikator dan Target Rencana Kinerja Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama						
	Persentase tindak lanjut						
IKK 1.1	kerjasama bilateral, regional dan multilateral	%	50	60	70	80	90
SK 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja						
	Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A						
IKK 2.1		%	81	82	83	84	85
SK 3	Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal						
	Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama						
IKK 3.1		Predikat	BB	BB	A	A	AA
SK 4	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran						
	Persentase satuan kerja dengan						
IKK 4.1	Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	%	83	84	85	86	87
SK 5	Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal						
	Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal						
IKK 5.1		Kategori	N/A	80	85	90	95
SK 6	Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek						
	Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik						
IKK 6.1		%	100	100	100	100	100

Tabel 2. 3 Alokasi Anggaran Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	274.337.015.000
2	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi	47.207.495.000
Total		321.544.510.000

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kerja Sama tidak melakukan revisi/penyesuaian Perjanjian Kinerja. Namun pada tahun 2025 terdapat perubahan alokasi anggaran Sekretariat Jenderal di dalamnya termasuk anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama berdasarkan revisi DIPA terakhir, yang semula sebesar Rp 321.544.510.000 menjadi sebesar 332.044.510.000. Berikut rincian alokasi anggaran Sekretariat Jenderal Kemdiktisaintek Tahun 2025 berdasarkan DIPA revisi akhir.

Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Akhir Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	284.837.015.000
2	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi	47.207.495.000
Total		332.044.510.000

D. Program Prioritas



Partisipasi Mendiktisaintek dalam forum 12th Education Ministers Meeting BRICS (Mendukung Keanggotaan BRICS Indonesia yang diresmikan Presiden pada Januari 2025)



Pelaksanaan The Week of Indonesia–Netherlands Education and Research (WINNER)



Pelaksanaan Joint Working Group RI-UK Bidang Pendidikan Tinggi



Revisi Informasi Kinerja sebagai tindak lanjut dari restrukturisasi Kementerian, dengan tetap mengacu dan diselaraskan pada dokumen perencanaan strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Renstra Kemdiktisaintek) Tahun 2025–2029



Pemenuhan Tunjangan Kinerja Dosen ASN dan Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai



Relaksasi Buka Blokir Anggaran Efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 Kemdiktisaintek TA 2025 dari Rp14,3 Triliun yang terblokir efisiensi pada awal tahun, lalu saat ini pagu blokir efisiensi menjadi Rp723 Miliar. Telah dilakukan pembukaan blokir/relaksasi sebesar Rp13,6 Triliun atau 95%



Pengembangan kanal monitoring PDLN, kanal laporan kerja sama dalam dan luar negeri, dan laman studi in Indonesia



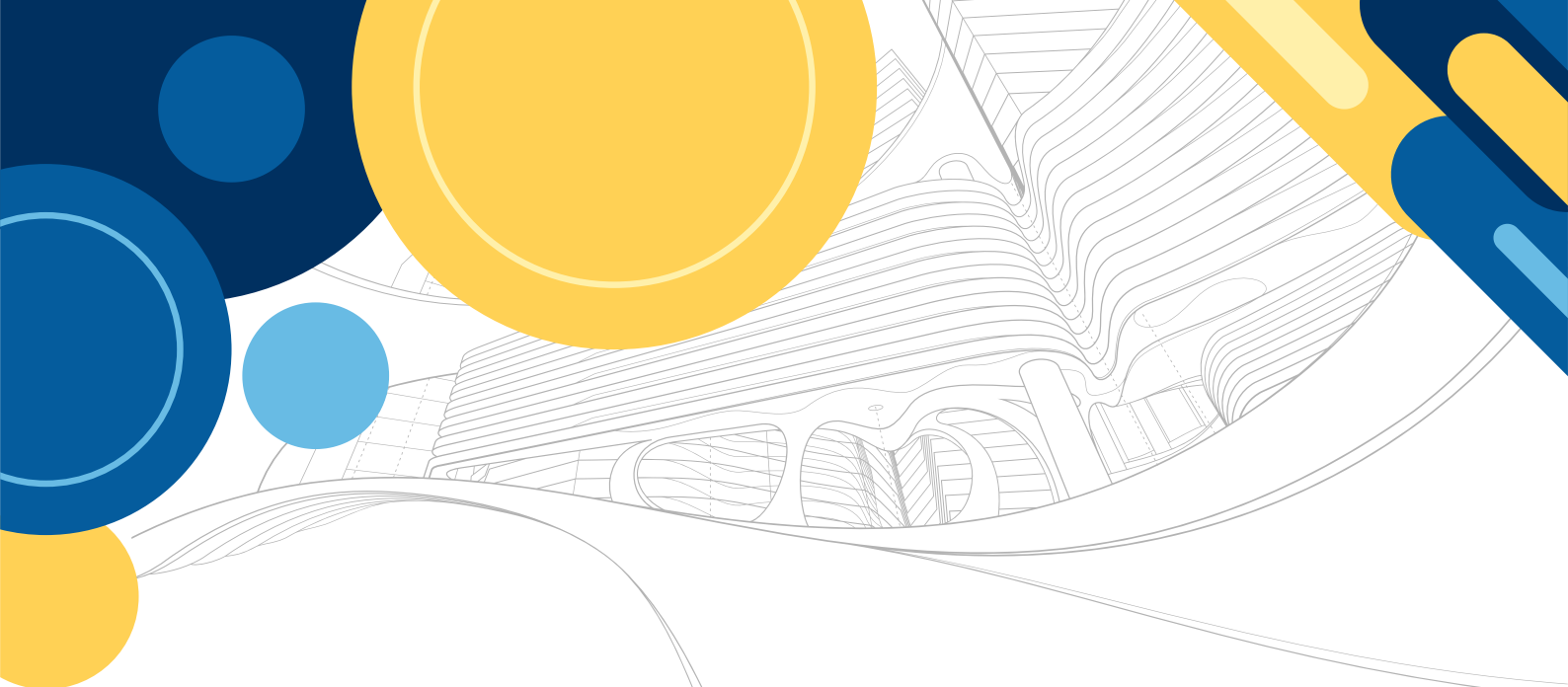
Tindak lanjut nota kesepahaman dengan mitra dalam negeri serta pelayanan PDLN yang prima.



Melakukan akselerasi kegiatan dan menginstruksikan seluruh satuan kerja untuk menyesuaikan Halaman III DIPA, serta berhasil memperoleh dispensasi nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I TA 2025 dari DJPb Kemenkeu.



Menyusun regulasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menetapkan 6 (enam) sasaran kegiatan yang didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara keseluruhan capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama menunjukkan hasil yang baik, dengan rata-rata capaian sebesar 113,4 persen, yang mencerminkan bahwa secara agregat pelaksanaan program dan kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan. Dari enam Indikator Kinerja Kegiatan yang diukur, empat indikator berhasil mencapai dan melampaui target, terutama pada aspek layanan kerja sama, penguatan tata kelola SAKIP, serta efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah berjalan secara efektif dan didukung oleh koordinasi lintas unit kerja yang optimal.

Namun demikian, terdapat dua Indikator Kinerja Kegiatan yang belum mencapai target, yaitu pada peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja serta efektivitas perencanaan dan penganggaran pusat. Pada indikator peningkatan akuntabilitas kinerja, belum tercapainya target persentase satuan kerja dengan predikat SAKIP minimal A mengindikasikan bahwa sebagian satuan kerja masih memerlukan penguatan dalam penyelarasan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja yang berorientasi pada outcome. Sementara itu, capaian indeks perencanaan dan penganggaran tahunan belum memenuhi target karena dilakukannya beberapa upaya penyesuaian anggaran dalam rangka memenuhi amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk memastikan ketercapaian target program-program prioritas. Sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas proses perencanaan, penajaman indikator kinerja, serta penguatan keterkaitan antara program, kegiatan, dan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam penguatan konsistensi penerapan perencanaan kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran di tingkat satuan kerja.

Berikut ini adalah capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada tahun 2025:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral	50%	59,7%	119,5%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP minimal A	81%	76,25%	94%
Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	BB	A	150%
Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	83%	90,85%	109,45%
Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Baik	Sangat Baik	120%
Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek	Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100%	87%	87%

SK 1

Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

Layanan kerja sama mencakup rangkaian proses mulai dari perencanaan, fasilitasi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kerja sama, yang melibatkan berbagai unit kerja serta pemangku kepentingan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan layanan yang prima agar setiap tahapan kerja sama dapat berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan memberikan kepastian serta nilai tambah bagi para pihak. Tersedianya layanan prima dalam kerja sama tercermin dari adanya prosedur dan mekanisme layanan yang jelas, dukungan koordinasi lintas unit kerja yang efektif, serta kemampuan unit pengelola kerja sama dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan respons yang cepat terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul. Selain itu, layanan kerja sama juga dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mampu mendukung

kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari kerja sama. Dengan demikian, Sasaran Kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan kerja sama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Sasaran Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kerja sama yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Layanan prima dimaknai sebagai kemampuan unit kerja dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama secara tepat waktu, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan, serta memastikan keberlanjutan dan manfaat kerja sama bagi pencapaian tujuan organisasi. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral, dengan target kinerja sebesar 50 persen, yang mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan efektivitas layanan kerja sama serta memperkuat kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan.

IKK 1.1

Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral

Tercapainya sasaran kegiatan "Tersedianya layanan prima dalam kerja sama" sebagaimana ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral dengan target sebesar 50% dan realisasi mencapai 59,7%. Pencapaian indikator ini mencerminkan kemampuan Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam memastikan seluruh proses tindak lanjut nota kesepahaman dengan mitra dalam negeri serta pelayanan PDLN yang prima mulai dari penyiapan dan penandatanganan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Berita Acara Kesepakatan, hingga fasilitasi partisipasi kementerian dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral dapat dilaksanakan secara tepat waktu, terkoordinasi dan berkelanjutan. Dampak dari capaian tersebut terlihat pada semakin luasnya jejaring kemitraan strategis, meningkatnya kepercayaan mitra nasional dan internasional serta menguatnya peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam kerja sama pendidikan tinggi, sains, riset di tingkat global. Capaian kinerja ini didukung oleh tingginya intensitas pelaksanaan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, meningkatnya kebutuhan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri yang dapat ditangani secara responsif, serta pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan kerja sama dan perjalanan dinas luar negeri yang mendorong peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan. Meskipun demikian, untuk

C. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

Dalam upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025, serta program yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kerja Sama merumuskan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2025 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator dan Target PK dan Renstra Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Sasaran Kinerja / IKK	Uraian	Satuan	Target PK 2025	Target Renstra 2025
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama				
[IKK 1.1]	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral	%	50	50
[SK 2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
[IKK 2.1]	Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	%	81	81
[SK 3] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 3.1]	Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Predikat	BB	BB
[SK 4] Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
[IKK 4.1]	[IKK 4.1] Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	%	83	83
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 5.1]	Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Kategori	Baik	Baik
[SK 6] Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek				
[IKK 6.1]	Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	100	100

Alokasi Anggaran Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kerja Sama termasuk kedalam anggaran Sekretariat Jenderal terdapat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan alokasi sebagai berikut.

menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas layanan kerja sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama melakukan upaya penguatan melalui peningkatan kapasitas dan penambahan sumber daya manusia, penyempurnaan alur koordinasi dengan mitra dan unit internal, intensifikasi sosialisasi dan bimbingan teknis serta pengembangan sistem pendukung agar pelaksanaan tindak lanjut kerja sama ke depannya tidak hanya memenuhi aspek kuantitatif, tetapi juga semakin berorientasi pada kualitas dan hasil yang berdampak.

Tindak lanjut program kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi adalah kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral yang diimplementasikan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama beserta seluruh unit utama dan satuan kerja di lingkungan Kemdiktisaintek yang diawali dari perjanjian internasional (*Letter of Intent, Agreement, Memorandum of Understanding, Implementing Arrangement, Plan of Action*), yang sifatnya bilateral hingga kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral (ASEAN, SEAMEO, G20, dsb). Persentase pelaksanaan program kerja sama dapat dikatakan efektif adalah jumlah program kerja sama yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang ada adalah jumlah program kerja sama yang telah dihasilkan selama tahun berjalan dan masih berlaku. Kerja sama dalam negeri meliputi kerja sama antar lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya terkait substansi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, dan penelitian. Tindak lanjut program kerja sama dalam negeri bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi adalah kerja sama dalam negeri yang diimplementasikan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama beserta seluruh unit utama dan satuan kerja di lingkungan Kemdiktisaintek yang diawali dari naskah perjanjian kerja sama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama).

Persentase pelaksanaan MoU program kerja sama luar negeri dihitung dari jumlah MoU/hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti secara menyeluruh atau sebagian oleh unit utama terkait dibagi dengan jumlah keseluruhan jumlah MoU yang telah ditandatangani Indonesia dan masih berlaku serta kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang pendidikan, sains dan teknologi. Persentase pelaksanaan naskah kerja sama program kerja sama dalam negeri dihitung dari jumlah naskah kerja sama yang ditindaklanjuti secara menyeluruh atau sebagian oleh unit utama terkait dibagi dengan keseluruhan jumlah naskah kerja sama yang telah ditandatangani dan masih berlaku.

Rumus perhitungan persentase tindak lanjut kerja sama yaitu sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan program kerja sama} = \frac{\text{(Jumlah Program yang dilaksanakan secara efektif)}}{\text{(Jumlah Program yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang ada)}} \times 100\%$$

Tabel 3. 2 Tabel Capaian SK Tersedianya Layanan Prima Dalam Kerja Sama

Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029
2022	2023	2024	Target PK	Realisasi	%		
90%	88,39%	89,5%	50%	59,70%	119,40%	90%	66,33%

Sumber : Data tahun 2022-2024 (Lakin Kemendikbudristek)

Pada tabel 3.2 terlihat bahwa capaian Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral tahun 2025 yaitu 59,70% dari target sebesar 50% dimana persentase capaian realisasi sebesar 119,40%. Jika di dibandingkan dengan target akhir renstra 2029 capaian realisasi sebesar 66,33%.

Perlu disampaikan bahwa data tahun 2022-2024 merupakan data yang bersumber dari Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek. Sementara itu, Biro Perencanaan dan Kerja Sama saat ini merupakan unit kerja baru yang berada dalam struktur Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dengan demikian, perbedaan kelembagaan, ruang lingkup tugas, serta basis pengelolaan data menyebabkan data kerja sama pada periode tersebut belum sepenuhnya dapat di bandingkan secara langsung sebagai satu rangkaian tren yang utuh. Pelaksanaan kerja sama di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja, efektivitas pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kemdikristek.

Dari aspek perencanaan, kerja sama telah disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis kementerian, termasuk Renstra dan Perjanjian Kinerja. Ruang lingkup dan tujuan kerja sama secara umum telah selaras dengan prioritas kebijakan, khususnya dalam penguatan ekosistem pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan kemitraan strategis. Indikator kinerja kerja sama telah ditetapkan untuk mengukur capaian secara kuantitatif. Pada aspek pelaksanaan, kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku. Koordinasi antar unit kerja dan dengan mitra telah berjalan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa perbedaan kesiapan mitra, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sistem pemantauan dan pelaporan kinerja kerja sama.

Berdasarkan hasil capaian tahun 2025 pada indikator persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah melebihi target Perjanjian Kinerja dan target Renstra Tahun 2025. Hal ini tercermin dari realisasi kegiatan kerja sama yang mendukung program prioritas kementerian, termasuk peningkatan kolaborasi riset dan inovasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kerja sama bilateral yang dilaksanakan antara Kemdiktisaintek dengan negara mitra diformalkan dengan sebuah perjanjian atau nota kesepahaman yang dinamakan *Memorandum of Understanding*. Penyusunan sebuah Memorandum of Understanding (MOU) dilaksanakan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta melibatkan seluruh Unit Utama Kemdiktisaintek.

Pada Tahun 2025 beberapa Memorandum of Understanding (MOU) bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi telah berhasil diformalkan dengan negara-negara mitra asing.

Tabel 3. 3 Negara yang telah bekerja sama di bidang pendidikan Tinggi

No	Negara	Bidang
1	Vietnam	Sains dan Teknologi
2	Turkiye	Pendidikan Tinggi
3	Rusia	Pendidikan Tinggi dan <i>Mutual Recognition</i>
4	Selandia Baru	Pendidikan
5	Yordania	Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
6	Pakistan	Pendidikan

Dalam kerja sama yang bersifat bilateral Kemdiktisaintek banyak menerima kunjungan para duta besar negara-negara mitra. Dalam kunjungan para duta besar ini dilakukan pertemuan untuk membahas kolaborasi secara formal dan tindak lanjut dari kolaborasi di bidang Pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Salah satu kunjungan bilateral dari negara mitra yaitu pertemuan atau *courtesy call* dengan duta besar Bulgaria dan Parlemen Aljazair.

Kerjasama regional dan multilateral yang dilakukan oleh Kemdiktisaintek menjadi sangat penting karena kehadiran serta keterwakilan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemdiktisaintek sangat penting. Kemdiktisaintek diharapkan berpartisipasi secara penuh untuk menjadikan agenda dan prioritas nasional dapat dilaksanakan secara global. Pada kegiatan Regional/Multilateral Kemdiktisaintek diwakili oleh Pejabat yang

ditunjuk oleh Kementerian untuk hadir baik secara langsung maupun secara tidak langsung/daring.

Tabel 3. 4 Agenda Regional dan Multilateral

No	Pertemuan Internasional	No	Pertemuan Internasional
1.	<i>1st EdWG G20 Meeting</i>	2.	<i>1st negotiation of the Draft G20 Education Ministers Declaration</i>
3.	<i>1st BRICS Education Seminar</i>	4.	<i>20th SOM-ED & 15th SOMED+3</i>
5.	<i>35th BRICS STI Steering Committee Meeting</i>	6.	Audiensi ADB - MoHEST
7.	Audiensi ASEAN China Centre - MoHEST	8.	<i>1st Workshop on the Development of ASEAN Work Plan 2026-2030</i>
9.	<i>8th AWGHEM</i>	10.	<i>14th APEC Conference on Cooperation in Higher Education</i>
11.	<i>OIC-15</i>	12.	<i>2nd negotiation of the Draft G20 Education Ministers Declaration</i>
13.	<i>2nd EdWG G20</i>	14.	<i>4th G20 EdWG & Ministerial Meeting</i>
15.	<i>11th BRICS Education Ministers Meeting</i>	16.	<i>BIMP-EAGA 28th Ministerial Meeting and Related Meetings</i>
17.	<i>ASEAN Ministerial Round Table</i>	18.	3rd Workshop on the Development of ASEAN Work Plan 2026-2030
19.	<i>10th BIMP-EAGA SCE Cluster Meeting</i>	20.	<i>ASEM Senior Official Meeting</i>
21.	<i>Audiensi ISTIC - MoHEST</i>	22.	<i>Education Policy Reform Dialogues 2025</i>
23.	<i>ASEAN tripartite Meeting on APTWG</i>	24.	<i>11th ADB International Education And Skills Forum</i>

Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan tantangan Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan kinerja kerja sama, keterbatasan data dukung berbasis *outcome*, serta variasi tingkat komitmen dan kesiapan mitra. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya capaian kerja sama di seluruh unit kerja dan belum sepenuhnya terukur manfaat jangka panjang dari kerja sama yang dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut, Biro Perencanaan dan Kerja Sama akan melakukan penguatan pengelolaan kerja sama melalui penyempurnaan implementasi kerja sama yang lebih

berorientasi pada dampak yang dihasilkan, peningkatan kualitas data dan pelaporan kinerja, serta penguatan koordinasi lintas unit kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kerja sama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian.

Tabel 3. 5 Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan Mitra

No	Mitra	Tindak Lanjut Kerja Sama
1	Kementerian Pertanian	Dalam proses tindak lanjut.
2	PT. Pindad	Pelaksanaan kerja sama di bidang riset sudah berjalan dalam skema ajakan industri. Untuk bidang kerja sama riset yang sifatnya lebih strategis masih dalam tahap pembahasan.
3	Perpustakaan Nasional	1. Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi oleh perguruan tinggi di desa lokasi KKN Tematik Literasi yang perpustakaanannya telah menerima bantuan buku bermutu dari Perpustakaan Nasional RI dengan kategori IPLM RENDAH dan SANGAT RENDAH. 2. Kerja Sama terkait pengembangan dan akses jurnal Ilmiah (SATU).
4	Kementerian Lingkungan Hidup	1. Pengukuhan Kader Lingkungan Kampus secara Serentak di 8 Universitas. 2. Gerakan sadar sampah di universitas antara lain pemilahan sampah, pengurangan sampah dari sumber dan pemanfaatan sampah; Penyediaan sarana dan prasana pengelolaan sampah; Penyediaan mata kuliah pilihan mengenai pengelolaan sampah (dalam koordinasi).
5	Badan Narkotika Nasional	Dalam proses tindak lanjut.
6	Badan Siber dan Sandi Negara	Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di lingkungan Kemdiktisaintek.
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama.
8	Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia	Pelaksanaan kerja sama di bidang riset sudah berjalan dalam skema ajakan industri. Untuk bidang kerja sama riset yang sifatnya lebih strategis masih dalam tahap pembahasan.
9	PT. PLN (Persero)	Pelaksanaan kerja sama di bidang riset sudah berjalan melalui skema program ajakan industri.

No	Mitra	Tindak Lanjut Kerja Sama
		Terkait bidang riset yang sifatnya strategis sedang dalam tahap pembahasan. Terkait dengan kerja sama peningkatan kapasitas SDM di bidang ketenagalistrikan, saat ini sedang berjalan (November) untuk bidang listrik tenaga nuklir.
10	Basarnas	Dalam proses tindak lanjut.
11	Kementerian Dalam Negeri	Implementasi program yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri belum bisa diusulkan karena Pusdatin belum memiliki ISO 27001 (persyaratan dari Kemdagri). Saat ini Pusdatin telah menyelesaikan tahap pelaksanaan sertifikasi ISO 27001:2022, estimasi sertifikat terbit di bulan Desember 2025.
12	Kementerian Hukum	Dalam proses tindak lanjut.
13	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Dalam proses tindak lanjut.
14	Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan	Implementasi program telah dilaksanakan di Perguruan Tinggi diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran
15	Kementerian Kebudayaan	Dalam proses tindak lanjut.
16	Badan Kepegawaian Negara	Pertukaran data ASN dan PDDikti dilakukan melalui Application Programming Interface/API yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama – Pusdatin
17	Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dalam proses tindak lanjut.
18	Himpunan Kawasan Industri	Dalam proses tindak lanjut.
19	Kementerian Transmigrasi	Dalam proses tindak lanjut.
20	Kementerian Sosial	1. Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama. 2. Dukungan terhadap Sekolah Rakyat, program unggulan Kementerian Sosial.
21	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dalam proses tindak lanjut.
22	Otoritas Jasa Keuangan	Dalam proses tindak lanjut.

No	Mitra	Tindak Lanjut Kerja Sama
23	Pemerintah Propinsi NTT	1. Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan (GENTASKIN) melalui Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa (KOSABANGSA) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. 2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 3. Pembentukan Forum Sinergi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Berdampak pada Pembangunan Nusa Tenggara Timur.
24	Kementerian Tenaga Kerja	Berbagi Pakai Data (Interoperabilitas) dan Pemanfaatan Informasi Ketenagakerjaan dan Pendidikan Tinggi untuk dukungan program magang lulusan di Kementerian / KL.
25	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia	Dalam proses tindak lanjut.
26	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Dalam proses tindak lanjut.
27	Kementerian Koperasi	Dalam proses tindak lanjut.
28	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia /Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Penguatan Migram Center di perguruan tinggi; Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Pasim (UNAS Pasim), Institut STIAM, dan Universitas Esa Unggul (UEU).
29	Kementerian Pertahanan	1. Dukungan pelaksanaan program <i>Presidential Fellowship in Economic and Business Leadership/Economic Business Leadership Executive Multidisciplinary Master Program</i> 2. Dukungan program Pengembangan Kepemimpinan Nasional yang akan dilaksanakan per tanggal 16 Januari 2026.
30	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	Dukungan program Pengembangan Kepemimpinan Nasional yang akan dilaksanakan per tanggal 16 Januari 2026.
31	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara	Dukungan program Pengembangan Kepemimpinan Nasional yang akan dilaksanakan per tanggal 16 Januari 2026.
32	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Pelaksanaan program di Kemdiktisaintek menggunakan Dana Abadi Pendidikan, Dana

No	Mitra	Tindak Lanjut Kerja Sama
		Abadi Penelitian, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merupakan salah satu layanan pendukung strategis dalam pencapaian sasaran kinerja kementerian, khususnya pada penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta diplomasi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Layanan PDLN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dari aspek perencanaan dan pengajuan, layanan PDLN telah menunjukkan kinerja yang semakin baik melalui pelaksanaan sosialisasi alur layanan yang jelas bagi unit kerja di lingkungan Kemdiktisaintek. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya ketertiban administrasi pengajuan perjalanan dinas luar negeri.

Meskipun demikian, masih terdapat pengajuan yang dilakukan dalam waktu terbatas, yang berdampak pada optimalisasi proses layanan. Kondisi ini menjadi perhatian untuk penguatan perencanaan kegiatan pada periode berikutnya. Pada proses perizinan, kinerja layanan ditunjukkan melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan Perguruan Tinggi serta upaya pemenuhan kelengkapan dokumen sesuai regulasi. Proses persetujuan perjalanan dinas luar negeri secara umum dapat dilaksanakan, namun durasi penyelesaian layanan masih dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen dan perubahan agenda. Upaya peningkatan kinerja difokuskan pada penguatan komunikasi dan pemantauan status perizinan secara lebih terstruktur. Jumlah PDLN yang terproses pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Penurunan proses PDLN tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 6 Dokumen PDLN Terproses Tahun 2024 dan 2025 di lingkungan Kemdiktisaintek

Tahun	Jumlah dokumen yang terproses	Jumlah orang yang berangkat
2024	5.792	13.150
2025	3.707	6.483

Sumber: Data dari Kementerian Sekretariat Negara per tanggal 5 Januari 2025

Sementara itu, perguruan tinggi di lingkungan Kemdiktisaintek denganajuan terbanyak pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 7 Daftar Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiktisaintek dengan Ajuan PDLN Terbanyak Tahun 2024 dan 2025

2025			2024		
No	Perguruan Tinggi	Jumlah PDLN	No	Perguruan Tinggi	Jumlah PDLN
1	Universitas Airlangga	358	1	Universitas Airlangga	739
2	Insitut Teknologi Bandung	271	2	Universitas Brawijaya	480
3	Universitas Gadjah Mada	221	3	Universitas Negeri Malang	333
4	Universitas Indonesia	211	4	Insitut Teknologi Bandung	317
5	Universitas Negeri Malang	177	5	Universitas Sebelas Maret	267
6	Universitas Sebelas Maret	155	6	Universitas Gadjah Mada	257
7	Universitas Diponegoro	151	7	Universitas Diponegoro	207
8	Universitas Andalas	118	8	Universitas Andalas	202
9	Universitas Padjadjaran	116	9	Universitas Negeri Surabaya	193
10	Unit Utama Pusat Kemdiktisaintek	113	10	Universitas Padjadjaran	177

Sumber: Data dari Kementerian Sekretariat Negara per tanggal 5 Januari 2025

Dalam hal negara tujuan, kegiatan perjalanan dinas luar negeri masih didominasi negara-negara Asia. Selama dua tahun berturut-turut Malaysia menjadi negara populer sebagai destinasi tujuan PDLN. Selain tidak memerlukan visa, lokasi, dan faktor biaya menjadi alasan negara-negara Asia masih populer di lingkungan perguruan tinggi. Namun hal tersebut masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Tabel 3. 8 Daftar Negara dengan Ajuan PDLN Terbanyak Tahun 2024 dan 2025

2025			2024		
No	Negara	Jumlah PDLN	No	Negara	Jumlah PDLN
1	Malaysia	618	1	Malaysia	1.522
2	Jepang	557	2	Jepang	625
3	Thailand	280	3	Thailand	508
4	Australia	266	4	Australia	418
5	Republik Rakyat Tiongkok	220	5	Korea Selatan	274
6	Inggris	217	6	Taiwan	269
7	Korea Selatan	150	7	Inggris	230

2025			2024		
No	Negara	Jumlah PDLN	No	Negara	Jumlah PDLN
8	Taiwan	150	8	Republik Rakyat Tiongkok	224
9	Belanda	124	9	Belanda	184
10	Singapura	114	10	Amerika Serikat	162

Sumber: Data dari Kementerian Sekretariat Negara per tanggal 5 Januari 2025

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Kemdiktisaintek masih memiliki tanggungan yang perlu diselesaikan. Berdasarkan data dari Kementerian Sekretariat Negara per tanggal 5 Januari 2025, dari jumlah perjalanan dinas sebanyak 3.707 ajuan, belum mengirim laporan sebanyak 2.646 (71,36%), sementara yang sudah mengirim laporan sebanyak 1.061 (28,64%). Secara keseluruhan, kinerja layanan perjalanan dinas luar negeri Kemdiktisaintek berada pada kategori cukup baik. Hal tersebut dinyatakan melalui apresiasi yang disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri selaku mitra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam proses Perjalanan Dinas Luar Negeri. Kemdiktisaintek menempati urutan ke 7 dari 117 K/L dengan persentasi cukup kecil dalam hal pengembalian dokumen ajuan PDLN. Hal tersebut mencerminkan proses validasi operator di *focal point* dan pemahaman dari unit pemohon sudah cukup baik. Ke depan, peningkatan kinerja akan difokuskan pada penetapan standar layanan yang terukur, optimalisasi sistem layanan digital, serta penguatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja pengguna layanan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna layanan, sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Faktor utama yang menjadi kunci pencapaian indikator kinerja ini adalah komitmen pimpinan dalam mengarahkan dan mengawal pelaksanaan kegiatan secara konsisten, kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam memfasilitasi koordinasi lintas unit serta menjalin kerja sama dengan mitra strategis, serta dukungan alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan pendukung indikator kinerja.

Program/Kegiatan

- 1 Penandatanganan 9 naskah Nota Kesepahaman dengan mitra yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, PT. PLN (PERSERO), BASARNAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.

- 2 Penandatanganan 2 naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tentang Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) dan Dana Abadi Penelitian (DAPL).
- 3 Penandatanganan 9 Naskah Nota Kesepahaman dengan mitra Kementerian Tenaga Kerja, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Sosial dalam bentuk adendum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Koperasi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pertahanan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Kementerian Pertahanan.
- 4 Melaksanakan Penilaian Proposal Anugerah Kerja Sama Diktisaintek Tahun 2025 sebanyak 507 proposal untuk kategori Perguruan Tinggi dengan Kerja Sama Internasional Terbaik, Perguruan Tinggi dengan Kerja Sama Industri Terbaik, Perguruan Tinggi dengan Kerja Sama Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Terbaik, Pengelolaan Laporan Kerja Sama (LAPKERMA) Terbaik, LLDIKTI dengan Penguatan/Fasilitasi Kerja Sama Terbaik.
- 5 Pelaksanaan Reviu dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) sebanyak 1.299 dokumen.
- 6 Berpartisipasi dalam *2nd negotiation of the Draft G20 Education Ministers Declaration*.
- 7 *Ministrial Meeting ASEAN in Education in Langkawi, Malaysia*.
- 8 *China – ASEAN Education Minister Dialogue in Wuhan, China*.
- 9 *Higher Level Policy Dialogue RI – Australia* bidang riset dan pendidikan tinggi.
- 10 Pelaksanaan *WINNER (Week of Indonesia & Netherland Education and Research) 2025*.
- 11 Pelaksanaan Kegiatan *Joint Working Group (JWG) Indonesia – United Kingdom* terkait *Trans National Education (TNE)* pendidikan tinggi dan penguatan ekosistem riset antara perguruan-perguruan tinggi Indonesia dengan pihak United Kingdom (UK).

Hambatan/Permasalahan

- 1 Sebagai unit kerja baru di Kementerian yang baru dengan keterbatasan sumber daya manusia, juga menjadi kendala yang dialami, mengingat dengan sumber daya yang terbatas tetapi perlu dioptimalkan dengan baik dengan load pekerjaan yang cukup tinggi.
- 2 Penyusunan MoU memerlukan waktu yang sangat lama, salah satunya koordinasi dan ketersediaan waktu mitra, dalam hal ini Kemlu, baik itu

direktorat kawasan dan direktorat HPSB, dan perlu di ketahui juga mitra asing mereka juga harus koordinasi antar Kementerian Luar Negeri negara asal mitra, seperti kita disini dengan KBRI dan Kementerian Teknis.

- 3** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkungan Kelompok Kerja Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri perlu pembaharuan.
- 4** Operator Perguruan Tinggi belum familiar dengan perubahan alur PDLN.
- 5** Durasi penyusunan naskah perjanjian kerja sama dengan LPDP yang membutuhkan waktu cukup lama.

Permasalahan umum yang dialami dalam kerja sama Luar Negeri yaitu pemetaan kembali pemrosesan, pengorganisasian dan pengelolaan kerja sama dengan mitra Bilateral, Regional, dan Multilateral yang perlu disesuaikan pada nomenklatur baru serta program prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Strategi/Tindak Lanjut

- 1** Membuat pedoman kerja sama berdampak untuk perguruan tinggi seiring dengan adanya pembaharuan di sistem Pelaporan Kerja Sama (LAPKERMA).
- 2** Membuat pedoman PDLN berdampak untuk perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat melakukan penyaringan terhadap pegawai yang akan melaksanakan PDLN. Perjalanan dinas yang dilakukan bertujuan untuk membawa dampak positif bagi perguruan tinggi asal.
- 3** Finalisasi Sistem Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIJALU) yang sedang dibangun untuk memudahkan monitoring dan penarikan data unit pemohon. Sebagai catatan, saat ini data PDLN selalu meminta kepada Kemensetneg, dengan adanya sistem ini diharapkan monitoring dan evaluasi dapat berjalan lebih cepat.
- 4** Meminta arahan lebih lanjut terkait peta jalan kerja sama antara Kemdiktisaintek dengan mitra sehingga prioritas kerja sama yang perlu dijalin oleh mitra dapat disampaikan pada awal penjajakan.
- 5** Menindaklanjuti penjajakan kerja sama yang belum selesai pada tahun 2025. Terdapat kurang lebih 17 naskah yang masih pending pada tahun 2025 yang perlu diselesaikan pada tahun 2026.



Gambar 3. 1 ASEAN Ministerial Round Table



Gambar 3. 2 20th SOM-ED dan 15th SOM-ED+3



Gambar 3. 3 Kunjungan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk tindak lanjut pembahasan Nota Kesepahaman antara Kemdiknasaintek dengan BSI



Gambar 3. 4 11th BRICS Education Ministers Meeting



Gambar 3. 5 Penandatanganan Nota Kesepahaman Adendum antara Kemdiktisaintek dengan Kemensos



Gambar 3. 6 Pelaksanaan JWG Indonesia – United Kingdom



Gambar 3. 7 Courtesy Call Mendiktisaintek dan Duta Besar Bulgaria



Gambar 3. 8 Courtesy Call Wamendiktisaintek dan Parlemen Aljazair

SK 2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Pada konteks tata kelola pemerintahan, tahun 2025 akan menjadi tahun penting bagi Kemdiktisaintek untuk memperkuat dasar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara khusus, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, yang berada di bawah Sekretariat Jenderal, melakukan tugas penting sebagai ruang komando yang mengatur arah kebijakan strategis organisasi. SAKIP harus dipandang lebih dari sekadar tindakan administratif; sebaliknya, harus dipandang sebagai bukti tanggung jawab publik yang menuntut transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya negara untuk memajukan sektor pendidikan tinggi dan teknologi.

Pergeseran paradigma dari *output-based* menuju *outcome-based performance* akan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Untuk Biro Perencanaan dan Kerja Sama, ini berarti menciptakan Indikator Kinerja yang lebih jelas dan berdampak. SAKIP harus mampu mendorong proses perencanaan program dan memulai kerja sama internasional dan domestik untuk meningkatkan riset dan pendidikan tinggi. Narasi kinerja menunjukkan angka serapan anggaran dan korelasi antara intervensi kebijakan dan capaian strategis kementerian.

Penguatan integritas data dan digitalisasi sangat penting untuk mendukung validitas tersebut. Adanya satu sumber kebenaran harus dijamin pada tahun 2025 dengan integrasi sistem informasi untuk perencanaan dan pemantauan kinerja. Biro Perencanaan dan Kerja Sama memiliki tanggung jawab untuk mengurangi asimetri informasi melalui penggunaan analitik data yang tepat. Jika setiap klaim tentang pencapaian kinerja didukung oleh bukti yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara auditif, maka akurasi data mencerminkan kemajuan birokrasi.

Selanjutnya, fokus evaluasi yang mendalam dalam penyusunan laporan ini adalah aspek penyelarasan kinerja. Akuntabilitas kinerja harus menunjukkan penjabaran yang logis dari sasaran di setiap level. Laporan Kinerja 2025 harus menunjukkan hubungan yang kuat antara rencana dan kolaborasi teknis dan visi besar kemajuan sains dan teknologi nasional. Ada kemungkinan bias kinerja, di mana pencapaian individu atau unit mungkin terlihat tinggi, tetapi tidak memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap tujuan organisasi secara makro. Bias kinerja ini dapat terjadi jika gagal menjelaskan *cascading* ini.

Selain itu, SAKIP harus mencakup analisis evaluasi yang menyeluruh, yang mencakup pengenalan tantangan dan strategi mitigasi risiko. Akuntabilitas yang tinggi ditandai dengan kejujuran dalam mengungkapkan kendala (analisis gap) yang terjadi selama tahun kerja. Diharapkan bahwa Biro Perencanaan dan Kerja Sama memberikan analisis mendalam tentang seberapa efektif strategi kerja sama internasional dan seberapa tepat alokasi sumber daya perencanaan.

Untuk menyimpulkan, membangun legitimasi dan kepercayaan publik adalah tujuan strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Laporan kinerja yang baik adalah indikator utama kesehatan organisasi di tengah tuntutan masyarakat untuk birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan menyediakan kinerja yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil, Biro Perencanaan dan Kerja Sama memenuhi kewajiban regulasi dan meneguhkan posisinya sebagai unit strategis yang mampu mengawasi kemajuan pendidikan tinggi dan teknologi di Indonesia.

IKK 2.1

Persentase Satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A

Indikator Persentase Satuan Kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A berfungsi sebagai indikator utama kematangan birokrasi di lingkungan Kemdiktisaintek dalam lingkungan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, pencapaian predikat minimal A (Memuaskan) menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai standar rata-rata tata kelola kinerja. Persentase yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pengukuran, perencanaan, pelaporan, dan evaluasi internal telah dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan berdampak pada pengurangan risiko organisasi yang optimal.

Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase satuan kerja dengan predikat SAKIP minimal A:

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja dengan Predikat SAKIP minimal A}}{\text{Jumlah Satuan Kerja yang di evaluasi AKIP}} \times 100\%$$

Hasil evaluasi yang komprehensif yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja indikator ini sebesar 76,25%. Hasil ini diperoleh dari penilaian terhadap 160 Satuan Kerja di lingkungan Kemdiktisaintek. Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) kinerja, pencapaian belum memenuhi target 81,0 persen tahun 2025. Kegagalan memenuhi target ini menunjukkan bahwa upaya untuk meratakan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja masih menghadapi masalah struktural dan teknis yang membutuhkan intervensi tambahan.

Tabel 3. 9 Nilai Interpretasi SAKIP

Kategori	Nilai	Interpretasi	Keterangan Interpretasi
AA	90 < 100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	80 < 90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas.

Kategori	Nilai	Interpretasi	Keterangan Interpretasi
BB	70 < 80	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.
B	60 < 70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	50 < 60	Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	30 < 50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 < 30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Kinerja tahun 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2024 mencapai 80,24%, yang berarti penurunan kinerja sebesar 3,99% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa masalah terbesar dalam manajemen kinerja adalah pencapaian predikat yang tinggi dan konsistensi penerapan budaya kinerja di tengah perubahan kebijakan dan organisasi.

Tabel 3. 10 Capaian Persentase Satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A

Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029
2021	2022	2023	2024	Target PK	Realisasi	%		
42,78%	58,08%	76,28%	80,24%	81%	76,25%	94,14%	85%	89.71%

Sumber : Data tahun 2021-2024 (Lakin Kemendikbudristek)

Keterangan Capaian tahun 2021 – 2024 menggunakan data saat masih menjadi Kemendikbudristek

15 satuan kerja dengan predikat terhormat "AA" dengan interpretasi Sangat Memuaskan, dan 107 satuan kerja dengan predikat "A" atau Memuaskan. Dominasi predikat A menunjukkan bahwa sebagian besar Satuan Kerja memiliki sistem manajemen kinerja yang baik dan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada akuntabilitas kinerja. Namun, mereka belum mencapai jumlah total yang ditargetkan untuk kementerian secara keseluruhan.

Pergerakan beberapa Satuan Kerja yang menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas merupakan dinamika yang patut diapresiasi. Ada dua Satuan Kerja yang berhasil melakukan lompatan kualitas dan mendapatkan predikat "AA", dan lima Satuan Kerja lainnya berhasil mendapatkan predikat "A". Angka pembilang indikator kinerja ini secara langsung berkontribusi pada hal ini. Di lapisan yang berbeda, tiga satuan kerja juga menunjukkan peningkatan, naik dari predikat B (Baik) ke BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan dan Kerja Sama melakukan peningkatan kinerja unit melalui pembinaan dan bantuan.

Namun demikian, volatilitas kinerja yang tidak menguntungkan di beberapa unit akan sangat memengaruhi pencapaian target tahun 2025. Menurut data evaluasi, tiga belas satuan kerja mengalami penurunan predikat. Meskipun predikat "BB" menunjukkan kinerja yang sangat baik, pergeseran ini dianggap tidak tercapai dalam konteks indikator "Minimal A". Ini adalah penurunan paling signifikan yang menghalangi capaian target. Selain itu, satu Satuan Kerja kehilangan predikat "B" dan dua Satuan Kerja kehilangan predikat "A". Meskipun keduanya masih dalam kategori target, penurunan ini tetap menjadi catatan evaluasi.

Adanya ketidaksesuaian dalam siklus SAKIP dalam hal keselarasan perencanaan strategis dan validitas pengukuran kinerja ditunjukkan oleh penurunan predikat sejumlah Satker ke level BB dan B. Dalam hal mitigasi risiko, penurunan ini menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi kinerja pada unit-unit tersebut belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi inefisiensi atau ketidakefektifan program sejak dini. Penunjukan "Memuaskan" (A) dan "Sangat Memuaskan" (AA) menuntut korelasi yang sempurna antara penggunaan anggaran dan dampak yang dihasilkan; organisasi yang mengalami penurunan nilai tidak memenuhi standar ini.

Konklusinya, tujuan evaluasi strategis Biro Perencanaan dan Kerja Sama adalah mencapai 76,25% pada tahun 2025. Meskipun sebagian besar Satuan Kerja (122 unit) telah memenuhi syarat dengan predikat minimal A, penurunan yang terjadi pada 13 Satker menjadi pengingat yang signifikan tentang pentingnya memperkuat sistem pengendalian kualitas. Untuk memastikan bahwa tata kelola kinerja Kemdiktisaintek benar-benar terstandarisasi, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata untuk pembangunan pendidikan tinggi dan teknologi, pembinaan akan berfokus pada peningkatan predikat dan pencegahan penurunan kinerja.

Program/Kegiatan

- 1 Menyusun Renstra Kemdiktisaintek 2025–2029 yang selaras dengan RPJMN serta sesuai dengan regulasi terbaru (Permen PPN 10/2023 dan Perpres 80/2025).
- 2 Melakukan penyusunan, finalisasi, dan harmonisasi Permendiktisaintek tentang Renstra 2025–2029 bersama Biro Hukum dan Kementerian Hukum.
- 3 Menyusun definisi operasional IKU Renstra dan melakukan input data ke dalam aplikasi Krisna Renstra.
- 4 Menyusun proses bisnis dan membangun Sistem Informasi Pengelolaan SAKIP Kemdiktisaintek.
- 5 Melaksanakan sosialisasi siklus kinerja (PK, Pengukuran, Evaluasi, Pelaporan) serta peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP.
- 6 Mengoordinasikan pengelolaan SAKIP dengan KemenPANRB dan seluruh Unit Utama di lingkungan kementerian.

Hambatan/Permasalahan

- 1 Perubahan nomenklatur kementerian dan baru tersedianya sumber daya pendukung SOTK baru per 1 Februari 2025, mengakibatkan keterlambatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
- 2 Penetapan RPJMN (Perpres 12/2025) pada Februari 2025 dan perubahan pedoman penyusunan Renstra (Perpres 80/2025) menyebabkan proses penyelarasan dan harmonisasi dengan Bappenas memakan waktu lama, sehingga Renstra baru dapat disahkan pada 9 Oktober 2025.
- 3 Diperlukan waktu tambahan untuk koordinasi substansi dengan BRIN terkait isu Manajemen Talenta Nasional.
- 4 Terdapat indikator kinerja baru yang belum memiliki *baseline* yang relevan dengan data tahun 2024, serta akses terhadap data *baseline* tersebut masih terbatas.
- 5 Pengesahan Renstra yang terlambat (Oktober 2025) menyebabkan satuan kerja (Satker) memiliki waktu yang sangat sempit untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dan menyusun penyesuaian kinerja.
- 6 Tingginya rotasi/pergantian SDM pengelola SAKIP di Satker serta budaya kinerja yang masih reaktif (menunggu perintah/surat pemberitahuan) menghambat akselerasi implementasi SAKIP yang mandiri.

Strategi/Tindak Lanjut

- 1 Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendikdasmen terkait penyusunan Rancangan Teknokratik, penyelarasan RPJMN, isu Manajemen Talenta Nasional (MTN), hingga persetujuan final Renstra Kemdiktisaintek.
- 2 Fasilitasi perwakilan dari seluruh satuan kerja untuk terlibat aktif dalam tim penyusun Rancangan Renstra.
- 3 Berkolaborasi dengan instansi terkait guna memutakhirkan data *baseline* sebagai basis penetapan target kinerja yang akurat.
- 4 Mengembangkan kembali sistem informasi kinerja sebagai instrumen digital untuk membangun budaya kinerja yang terukur di seluruh satuan kerja.
- 5 Melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP bekerja sama dengan mitra strategis.
- 6 Melakukan pendampingan khusus (asistensi) bagi 10 satuan kerja baru yang diproyeksikan akan menjalani evaluasi kinerja perdana pada tahun 2026.



Gambar 3. 9 Reviu Definisi Operasional Kemdiktisaintek



Gambar 3. 10 Pelaksanaan Reviu Renstra Sekretariat Jenderal



Gambar 3. 11 Peningkatan Kompetensi SAKIP di Lingkungan Kemdiktisaintek

SK 3

Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal

Beralih dari birokrasi berorientasi administratif ke birokrasi berorientasi hasil, penguatan tata kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal Kemdiktisaintek akan terjadi pada tahun 2025. Sekretariat Jenderal memainkan peran penting dalam menjamin bahwa setiap unit kerja di bawahnya memiliki standar akuntabilitas yang tepat, karena fungsinya sebagai unit *enabler* yang membantu menjalankan seluruh layanan kementerian. Peningkatan kualitas tata kelola ini tidak hanya dimaksudkan untuk mematuhi peraturan, tetapi juga untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan alokasi sumber daya dan efisiensi capaian kinerja organisasi, selaras dengan tujuan nasional di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Dalam upaya untuk memperbaiki tata kelola SAKIP pada tahun 2025, kinerja semakin menyelaraskan dari tingkat strategis kementerian ke tingkat operasional satuan kerja. Untuk memastikan bahwa pohon kinerja (rangkaian logis) di setiap unit kerja Sekretariat Jenderal memiliki hubungan kausalitas yang logis dan terukur, Biro

Perencanaan dan Kerja Sama telah meningkatkan pendampingan teknis. Hal ini mengurangi fenomena kinerja yang tidak terhubung, di mana hasil organisasi seringkali tidak berkorelasi langsung dengan capaian output kegiatan. Tahun ini, terlihat bahwa integrasi antara perencanaan strategis dan penganggaran (juga dikenal sebagai "*money follows program*") menjadi lebih kuat. Ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan memiliki daya ungkit terhadap indikator kinerja utama.

Penguatan validitas dan integritas data kinerja adalah elemen penting lainnya yang menunjukkan peningkatan tata kelola ini. Tahun 2025 berkontribusi pada penerapan budaya laporan kinerja berbasis bukti di Sekretariat Jenderal. Tidak lagi sekadar melaporkan hasil fisik dan keuangan, perusahaan sekarang harus memberikan analisis efisiensi dan efektivitas yang didukung oleh data yang akurat. Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah mendorong digitalisasi evaluasi dan pemantauan, yang memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time. Ini memungkinkan untuk menemukan dan mengurangi kesalahan lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir.

Selain itu, evaluasi internal yang berkualitas tinggi yang dilakukan secara berkala menunjukkan peningkatan tata kelola SAKIP. Mekanisme evaluasi mandiri di Sekretariat Jenderal telah berubah menjadi forum diskusi konstruktif tentang kinerja. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, proses ini juga berfungsi sebagai pembelajaran organisasi untuk menemukan hambatan struktural dan menemukan solusi kreatif. Ada indikasi bahwa maturitas implementasi SAKIP akan meningkat di tahun 2025. Ini ditunjukkan oleh peningkatan kemampuan evaluator internal dan komitmen pimpinan satuan kerja untuk mengikuti rekomendasi perbaikan.

Keberhasilan tata kelola SAKIP tahun ini juga dipengaruhi oleh internalisasi budaya kinerja. Dalam Sekretariat Jenderal, pola pikir aparatur telah berubah. Akuntabilitas kinerja sekarang dianggap sebagai bagian dari organisasi untuk memberikan pelayanan prima, bukan sekadar laporan. Dengan kesadaran ini, inovasi tata kelola di tingkat mikro satuan kerja muncul, meningkatkan efisiensi proses bisnis. Biro Perencanaan dan Kerja Sama secara aktif membantu berbagi pengetahuan antar-satuan kerja untuk membangun praktik pengelolaan kinerja yang adaptif dan responsif.

Sebagai kesimpulan, tata kelola SAKIP akan lebih besar di Sekretariat Jenderal pada tahun 2025. Ini adalah bukti komitmen Kemdiktisaintek untuk memiliki pemerintahan yang baik. Untuk mempertahankan standar kinerja yang lebih tinggi di masa depan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggunakan pencapaian ini sebagai modal sosial penting. Dengan tata kelola yang semakin transparan, jujur, dan terukur, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat menjadi role model bagi unit utama lainnya dalam

mengelola kinerja organisasi. Ini akan berdampak nyata pada kemajuan ekosistem pendidikan tinggi dan teknologi di Indonesia

IKK 3

Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bukti kematangan budaya kinerja organisasi di lingkungan tata kelola pemerintahan. Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemdiktisaintek, berharap capaian predikat SAKIP tahun 2025 menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa efektif peran strategisnya sebagai pengorganisasian dan koordinasi. Seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan strategis, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal, telah dilakukan secara integratif dan berorientasi pada hasil selama evaluasi tahun ini.

Predikat SAKIP dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Predikat SAKIP} = A + B + C + D$$

Keterangan

- A : Perencanaan Kinerja
- B : Pengukuran Kinerja
- C : Pelaporan Kinerja
- D : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Biro Perencanaan dan Kerja Sama mencapai lebih banyak daripada yang diharapkan pada awalnya. Biro berhasil mencapai target perjanjian kinerja dengan predikat "BB", yang berarti kinerja yang memuaskan. Kualitas implementasi SAKIP Biro dapat melampaui standar minimal "Sangat Baik" yang diproyeksikan, yang menunjukkan deviasi positif dari target. Kesuksesan melampaui target ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen dan akuntabilitas Biro cukup kuat untuk memenuhi tuntutan kinerja tahun berjalan.

Tabel 3. 11 Capaian Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029
2022	2023	2024	Target PK	Realisasi	%		
A	A	AA	BB	A	150%	AA	100

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Keterangan Capaian tahun 2021 – 2024 menggunakan data LHE Biro Perencanaan Kemendikbudristek



Menurut interpretasi predikat "A", Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja. Predikat ini menunjukkan bahwa unit kerja memiliki pengukuran kinerja yang berjenjang, pelaporan yang dapat diandalkan, dan kemampuan untuk menyesuaikan tujuan strategis organisasi dengan aktivitas operasional harian. Secara substansial, predikat "A" menunjukkan bahwa Biro tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi juga memiliki kemampuan untuk menunjukkan keuntungan dari setiap program perencanaan dan kerja sama yang dijalankan.

Namun demikian, fenomena penurunan kinerja perlu dicatat dalam evaluasi menyeluruh ketika dibandingkan dengan data *historis* (prestasi *historis*). Tahun 2025 memiliki pencapaian dengan predikat "A" yang lebih rendah daripada tahun 2024, yang memiliki pencapaian dengan predikat "AA" yang sangat memuaskan. Penurunan nilai dari "AA" menjadi "A" menunjukkan bahwa ada kesulitan untuk mempertahankan konsistensi kualitas akuntabilitas di tengah dinamika organisasi. Meskipun masih berada di atas target (BB), hilangnya predikat "AA" menunjukkan bahwa elemen unggul belum sepenuhnya dapat dipertahankan atau diterapkan pada tahun 2025.

Penurunan predikat ini tidak dapat dilepaskan dari konteks transisi dan perubahan kelembagaan di Kemdiktisaintek. Indikator kinerja dan mekanisme pelaporan sering kali perlu disesuaikan ketika struktur dan nomenklatur organisasi berubah. Kegagalan (*gap*) dalam pembuktian dampak (*outcome*) kinerja yang sekuat tahun sebelumnya mungkin disebabkan oleh peningkatan standar penilaian evaluasi yang menuntut inovasi kinerja yang lebih mengganggu, yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh Biro pada tahun 2025.

Dalam bidang pemanfaatan data kinerja untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), evaluasi mendalam menunjukkan bahwa pergeseran dari "AA" ke "A" sering terjadi. Jika pada tahun 2024 Biro dinilai sangat memuaskan dalam memitigasi risiko dan menciptakan efisiensi lintas sektor, pada tahun 2025 aspek tersebut mungkin dinilai "memuaskan", tetapi belum mencapai tingkat yang luar biasa. Hal ini mendorong manajemen untuk meninjau kembali kualitas analisis laporan kinerja dan memperkuat bukti yang menunjukkan bagaimana kebijakan perencanaan berdampak pada kualitas pendidikan tinggi dan teknologi.

Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, capaian predikat "A" tetap harus dianggap sebagai prestasi yang patut diapresiasi karena kinerjanya masih berada di atas target BB dan di koridor kinerja tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dan keseimbangan, serta sistem manajemen di dalam Biro Perencanaan dan Kerja Sama, masih beroperasi dengan baik. Meskipun kinerja "A" memerlukan

kalibrasi ulang untuk kembali ke puncak kinerja "AA", predikat "A" menjamin bahwa akuntabilitas Biro masih menjadi salah satu standar yang baik di Sekretariat Jenderal.

Tabel 3. 12 Capaian Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama 2021-2025

No	Komponen	Bobot	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60	27,00	27,60	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,60	27,00	27,60	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,85	12,75	13,50	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,75	21,25	22,50	20,50
Total			82,80	88,00	91,20	82,00
Predikat			A	A	AA	A

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Keterangan Capaian tahun 2022 – 2024 menggunakan data LHE Biro Perencanaan Kemendikbudristek

Biro Perencanaan dan Kerja Sama berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi tahun 2025 sebagai landasan perbaikan (baseline for improvement) sebagai langkah strategis ke depan. Mengembalikan performa ke level "AA" akan menjadi fokus utama tahun mendatang melalui peningkatan integrasi sistem perencanaan digital, peningkatan kualitas evaluasi internal, dan perbaikan indikator kinerja utama untuk menjadi lebih berorientasi dampak. Diharapkan bahwa Biro dapat memperoleh kembali predikat "Sangat Memuaskan" sebagai bukti komitmen tertinggi untuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan menerapkan strategi yang tepat.

Program/Kegiatan

- 1 Melakukan reviu Renstra periode 2020–2024 untuk memetakan potensi dan permasalahan sebagai basis penyusunan sistematika Renstra Biro 2025–2029.
- 2 Merumuskan dan menajamkan sasaran, indikator kinerja, target, serta menyusun definisi operasional (DO) indikator Biro Perencanaan dan Kerja Sama.
- 3 Menyelesaikan penyusunan dokumen Renstra Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025–2029.
- 4 Memberikan masukan substantif terhadap draf Renstra Kemdiktisaintek dan Renstra Sekretariat Jenderal untuk memastikan keselarasan arah kebijakan.
- 5 Menyusun tata kelola data kinerja serta menyelesaikan penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri SAKIP Biro.

Hambatan/Permasalahan

- 1 Biro Perencanaan dan Kerja Sama baru beroperasi efektif mulai awal Februari 2025 pasca-pelantikan pimpinan, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas.

- 2 Terdapat kekurangan jumlah SDM (kuantitas) pada setiap fungsi dan substansi kerja, yang menghambat akselerasi pelaksanaan tugas.
- 3 Kebijakan efisiensi anggaran membatasi pelibatan tenaga ahli/narasumber kompeten, sehingga proses penyusunan *cascading* kinerja dan penyelarasan Rancangan Teknokratik Renstra menjadi kurang optimal.
- 4 Siklus SAKIP belum berjalan optimal karena bergantung pada pengesahan Rencana Strategis Kementerian yang mengalami keterlambatan.
- 5 Sebagai unit kerja baru, Biro menghadapi kesulitan menetapkan *baseline* kinerja yang setara dengan capaian historis kementerian sebelumnya (Predikat AA), serta menghadapi penetapan target Renstra yang dinilai terlalu tinggi/belum realistis bagi kapasitas organisasi baru.

Strategi/Tindak Lanjut

- 1 Berkoordinasi dengan Biro OSDM dan Tim Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten serta optimalisasi (relaksasi) anggaran pelaksanaan kegiatan.
- 2 Melakukan studi banding dan pertukaran (*resource sharing*) dokumen SAKIP dengan Kemdikdasmen sebagai referensi perbaikan tata kelola.
- 3 Menyamakan persepsi terkait metode pengukuran dan *cascading* kinerja agar selaras dengan standar yang berlaku.
- 4 Melakukan inventarisasi dan digitalisasi dokumen bukti dukung kinerja secara tertib sesuai regulasi.



Gambar 3. 12 Rekonsiliasi Anggaran di Lingkungan Biro Perencanaan dan Kerja Sama



Gambar 3. 13 Penyusunan Matrik Peran Hasil di Lingkungan Biro Perencanaan dan Kerja Sama

SK 4

Meningkatnya Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran

Sasaran kegiatan Meningkatkan Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran merupakan pilar utama dalam menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemdiktisaintek. Selain itu, sasaran kegiatan ini juga berperan strategis dalam memperkuat tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan kinerja anggaran. Dalam ekosistem pendidikan tinggi dan sains yang dinamis, fungsi pemantauan tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mendeteksi dini (*early warning system*) potensi deviasi pelaksanaan program. Biro Perencanaan dan Kerja Sama melakukan koordinasi sekaligus pembinaan pada satuan kerja di lingkungan Kemdiktisaintek dengan tujuan menetapkan sasaran Meningkatkan Efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran agar berjalan baik sesuai dengan koridornya. Sasaran ini diwujudkan melalui penguatan mekanisme pengendalian internal yang terintegrasi, mulai dari pemantauan realisasi fisik dan keuangan evaluasi dampak (*outcome*) program.

Indikator keberhasilan sasaran ini tidak hanya dilihat dari tersajinya laporan monev, tetapi pada seberapa efektif hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti (*follow-up action*) oleh unit-unit kerja. Dengan mekanisme umpan balik yang efektif, hambatan teknis di lapangan dapat segera diurai, dan akselerasi penyerapan anggaran dapat dilakukan

secara akuntabel, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dengan tata kelola pemantauan dan evaluasi yang kuat, transparansi penggunaan anggaran dapat terjaga, dan keselarasan antara visi strategis kementerian dengan implementasi program di tingkat satuan kerja dapat terus dikawal secara konsisten.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Satuan Kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik, dengan target kinerja sebesar 83 persen, yang menunjukkan komitmen organisasi dalam memastikan sebagian besar satuan kerja memiliki kinerja anggaran yang terkendali, efisien, dan mendukung pencapaian output serta outcome program secara optimal.

IKK 4.1

Persentase Satuan Kerja Dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2024 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait dengan nilai evaluasi kinerja anggaran bukanlah PMK tunggal, melainkan terdapat KMK Nomor 466 Tahun 2023 yang merupakan pembaruan mekanisme dari PMK Nomor 22/PMK.02/2021, yang mengubah jumlah dan jenis variabel perhitungan kinerja anggaran di tingkat satuan kerja, unit eselon I dan K/L. Perubahan utama meliputi fokus pada capaian output dan nilai efisiensi (melalui implementasi SBK) di tingkat satuan kerja, serta capaian indikator kinerja pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti yang diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023. Kinerja Anggaran merupakan capaian atas pemanfaatan anggaran yang tercantum dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran adalah hasil penilaian yang diperoleh dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator:

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

Dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, EKA memiliki bobot penilaian sebesar 50% dan IKPA juga memiliki bobot penilaian yang sama yaitu 50%. Nilai kinerja anggaran digunakan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar, dan/atau penyusunan alokasi anggaran tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan, serta sebagai dasar pelaksanaan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi. Semakin tinggi Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran unit eselon I yang dicapai Indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya dan menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi.

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = (50\% \times \text{Nilai EKA}) + (50\% \times \text{Nilai IKPA})$$

Tabel 3. 13 Indikator penilaian NKA

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80% - 90%	Baik
>60% - 80%	Cukup
>50 % 60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Nilai Kinerja Anggaran

Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029
2022	2023	2024	Target PK	Realisasi	%		
100%	100%	100%	83%	90,85%	109,46%	87%	104,43%

Sumber: Data di olah rekapitulasi capaian kategori Nilai Kinerja Anggaran
Keterangan Capaian tahun 2022 – 2024 menggunakan data di olah Kemendikbudristek

Pada tahun 2025, kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Berdasarkan data realisasi kinerja, indikator Persentase Satuan Kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik berhasil mencapai angka 90,85 persen.

Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Target PK) tahun 2025 sebesar 83 persen. Gap sebesar kurang lebih 4% menuju target 2029 diharapkan dapat ditutup pada periode tahun berikutnya melalui konsistensi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Secara kuantitatif, tingkat capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 109,46 persen (Sangat Baik). Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa mayoritas satuan kerja telah mampu mengelola anggaran secara tertib, efisien, dan efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memenuhi standar penilaian kinerja penganggaran (SMART DJA/IKPA). Jika disandingkan dengan perencanaan jangka panjang, realisasi tahun 2025 sebesar 90,85 persen ini telah mendekati Target Akhir Renstra tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 87 persen. Progres pencapaian terhadap target akhir Renstra tersebut saat ini telah mencapai 104,43 persen, yang menunjukkan bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat (*on-track*) untuk menuntaskan sasaran strategis lima tahunan.

Komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas belanja (*spending quality*) tercermin dari realisasi indikator kinerja anggaran tahun 2025. Capaian di atas merefleksikan efektivitas pembinaan dan tata kelola keuangan yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa satuan-satuan kerja di lingkungan Kemdiktisaintek tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan, efisiensi, dan ketercapaian *output*. Selain itu, akselerasi kinerja pada tahun 2025 memberikan modal yang kuat untuk pencapaian jangka panjang. Dengan realisasi saat ini, capaian terhadap target akhir.

Program/Kegiatan

- 1 Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025 yaitu melakukan penyesuaian anggaran dan revisi target kinerja sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi, termasuk koordinasi pembukaan blokir dengan unit utama.
- 2 Memantau pelaporan capaian output seluruh satuan kerja pada aplikasi SAKTI dan melakukan konfirmasi/teguran kepada satuan kerja dengan capaian rendah.
- 3 Berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait proses Revisi Informasi Kinerja.
- 4 Memantau penggunaan dan melakukan *tagging* Rincian Output (RO) SBK/SBKU seluruh satuan kerja pada aplikasi terkait.
- 5 Melakukan pemantauan terhadap pelaporan capaian output seluruh satker pada aplikasi SAKTI.

Hambatan/Permasalahan

- 1 Beberapa kegiatan terhambat dan mundur dari jadwal pelaksanaan akibat adanya efisiensi anggaran, sehingga belum bisa melakukan penginputan capaian output di aplikasi SAKTI.
- 2 Pengajuan RO SBK menunggu penyesuaian anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- 3 Rendahnya deviasi halaman III DIPA pada nilai IKPA yang mempengaruhi NKA akibat kebijakan efisiensi anggaran.
- 4 Keterlambatan melakukan input IKP dan IKSS karena masih menunggu pengesahan Rencana Strategis Kemdiktisaintek.
- 5 Adanya anggaran yang diblokir, sehingga capaian output belum maksimal.
- 6 Ada RO SBK yang belum tertanggung di aplikasi Monev Kemenkeu.
- 7 Pemantauan capaian IKSS belum terlaksana karena masih menunggu Rencana Strategis Kemdiktisaintek.
- 8 Masih terdapat tagging IKSS yang belum tepat pada aplikasi SAKTI sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut

- 1 Mengoordinasikan kebijakan efisiensi anggaran dan proses pembukaan blokir (*automatic adjustment*) bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
- 2 Melakukan akselerasi kegiatan dan menginstruksikan seluruh satuan kerja untuk menyesuaikan Halaman III DIPA, serta berhasil memperoleh dispensasi nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I TA 2025 dari DJPb Kemenkeu.
- 3 Mengusulkan RO SBK bersama Unit Utama dan DJA, serta melakukan pemetaan dan *tagging* RO SBK pada aplikasi Monev Kemenkeu.
- 4 Mengoordinasikan pembuatan hak akses (*user*) aplikasi SAKTI dengan Ditjen Perbendaharaan dan unit terkait.
- 5 Mengawal penyusunan Rencana Strategis Kemdiktisaintek bersama tim akuntabilitas.



Gambar 3. 14 Rapat koordinasi NKA Kemdiktisaintek



Gambar 3. 15 Rapat koordinasi SBSN di Lingkungan Kemdiktisaintek

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Sekretaris Jenderal

Sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal merupakan wujud komitmen organisasi untuk mentransformasi paradigma pengelolaan keuangan negara. Fokus utama sasaran ini bukan sekadar pada tingginya persentase penyerapan anggaran, melainkan pada peningkatan kualitas belanja (*spending quality*). Tata kelola yang baik ditandai dengan perencanaan penganggaran yang presisi, pelaksanaan yang patuh terhadap regulasi, serta capaian *output* yang memberikan manfaat nyata. Melalui sasaran ini, Sekretariat Jenderal memastikan bahwa setiap satuan kerja di bawah koordinasinya mampu mengelola APBN secara akuntabel, efisien, dan efektif, selaras dengan prinsip *Value for Money*.

Sekretariat Jenderal menempuh strategi pembinaan dan monitoring yang intensif terhadap satuan kerja di lingkungannya. Upaya ini meliputi optimalisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) melalui aplikasi SMART DJA dan Monev Bappenas. Penguatan tata kelola dilakukan dengan meminimalisir revisi anggaran, meningkatkan akurasi Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), serta mempercepat capaian output. Peningkatan tata kelola ini menjadi indikator bahwa fungsi *enabler* Sekretariat Jenderal dalam memfasilitasi dukungan manajemen bagi unit-unit teknis (Biro/Pusat) telah berjalan pada koridor kepatuhan dan kinerja yang terstandarisasi.

Capaian ini ditujukan untuk mematuritaskan sistem pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal. Konsistensi antara perencanaan dengan realisasi, serta ketertiban dalam pelaporan data capaian output, membuktikan bahwa tata kelola anggaran telah terinternalisasi dengan baik, memitigasi risiko inefisiensi dan potensi temuan pemeriksaan.

IKK 5.1

Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal

Pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal tahun 2025 menghadapi tantangan dinamis mengingat cakupan pengelolaannya yang meliputi 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat. Di tengah masa transisi dan penyesuaian kelembagaan.

Meskipun menghadapi kendala dalam hal konsolidasi target *output* dari unit-unit baru, Sekretariat Jenderal tetap berkomitmen menjaga akuntabilitas keuangan. Upaya akselerasi realisasi kegiatan pada masing-masing Biro dan Pusat terus didorong untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak kinerja yang terukur sesuai dengan sasaran strategis Sekretariat Jenderal.

Pelaksanaan RKA-K/L pada DIPA Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai tulang punggung operasional bagi 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pencapaian ini menegaskan komitmen Sekretariat Jenderal dalam memberikan layanan prima kepada organisasi. Kategori nilai ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk 5 Biro dan 1 Pusat tersebut telah dikelola dengan prinsip *value for money*. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam DIPA Sekretariat Jenderal telah berhasil dikonversi menjadi *output* layanan birokrasi yang konkret, yang menjadi fondasi bagi kelancaran tugas teknis satuan-satuan kerja di Sekretariat Jenderal.

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran, dapat menggunakan rumus berikut ini

$$NKA = (50\% \times \text{Nilai EKA}) + (50\% \times \text{Nilai IKPA})$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA, nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Tabel 3. 15 Kategori Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80% - 90%	Baik
>60% - 80%	Cukup
>50 % 60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Semakin tinggi nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Unit Eselon I yang dicapai indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya dan menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal, berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dimana capaian kinerja yang diraih yaitu 96,15% (sangat baik) dari target baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal telah berjalan secara efektif dan akuntabel, didukung oleh kebijakan pengelolaan anggaran yang semakin terarah serta penguatan koordinasi antar unit kerja. Hal ini tercermin dari keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta konsistensi dalam pengendalian dan evaluasi anggaran. Selain itu, koordinasi yang intensif antar

unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran turut meningkatkan ketepatan pelaksanaan kegiatan dan kualitas capaian kinerja anggaran secara keseluruhan.

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan NKA atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal

Target PK	Tahun 2025		Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029
	Realisasi	Predikat		
Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Data di olah rekapitulasi capaian kategori Nilai Kinerja Anggaran

Keterangan Capaian tahun 2022 – 2024 menggunakan data di olah Kemendikbudristek

Tabel 3. 17 Predikat dan Nilai Periode 2022-2024 Kemdikbudristek

Satuan Kerja	Predikat			Nilai		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	94,23	96,89	97,67
Biro Keuangan dan BMN	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	94,57	98,57	98,75
Biro Organisasi dan Sumber Daya	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	95,94	91,49	98,93
Biro Hukum	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	94,64	98,47	98,36
Biro Umum, Humas, dan PBJ	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	96,45	98,38	90,95
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	91,18	95,09	95,40

Sumber: Data di olah rekapitulasi capaian kategori Nilai Kinerja Anggaran

Keterangan Capaian tahun 2022 – 2024 menggunakan data di olah Kemendikbudristek

Kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, yang secara administratif mampu pengelolaan anggaran bagi 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat, menunjukkan capaian yang positif pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil evaluasi melalui aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan, Satker Sekretariat Jenderal berhasil meraih Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 95,61 dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini merefleksikan keberhasilan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas unit. Sinergi antara kelima Biro dan Pusat dalam merealisasikan target *output* (mulai dari layanan perencanaan, keuangan, SDM, hukum, hingga layanan teknis lainnya) terbukti berjalan efektif dalam satu DIPA terpusat, sehingga menghasilkan kualitas belanja (*spending quality*) yang akuntabel dan efisien.

Satuan Kerja Sekretariat Jenderal tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang membanggakan berdasarkan evaluasi SMART DJA. Capaian ini memiliki nilai strategis



mengingat kompleksitas pengelolaan DIPA Sekretariat Jenderal yang menaungi alokasi anggaran bagi 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Pusat. Tingginya NKA ini merefleksikan efektivitas fungsi koordinasi dan konsolidasi yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola anggaran terpusat yang diterapkan mampu memitigasi risiko fragmentasi kinerja. Meskipun terdapat tantangan dalam menyelaraskan ritme penyerapan anggaran dari unit-unit dengan karakteristik fungsi yang beragam (Biro dan Pusat), Satuan Kerja ini berhasil menjaga konsistensi antara perencanaan (Halaman III DIPA) dengan realisasi di lapangan, serta memastikan capaian *output* strategis dari masing-masing unit terpenuhi tepat waktu.

Program/Kegiatan

- 1 Melaksanakan penginputan data capaian output (Triwulan I, II, IV) dan Indikator Kinerja Program (IKP) secara berkala pada aplikasi SAKTI serta pelaporan *tagging* RO SBKU pada aplikasi Monev Kemenkeu.
- 2 Melakukan harmonisasi revisi informasi kinerja bersama Bappenas dan Kemenkeu, serta koordinasi internal Satker terkait ketepatan *tagging* RO SBK.
- 3 Optimalisasi alokasi anggaran tindak lanjut kebijakan efisiensi (Inpres 1/2025).
- 4 Pemantauan dan penetapan penggunaan SBK pada RO di lingkungan Kemdiktisaintek.
- 5 Penginputan realisasi Capaian Output (Triwulan I, II, dan IV) serta data IKP pada aplikasi SAKTI.
- 6 Koordinasi teknis dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait Revisi Informasi Kinerja.
- 7 Pelaporan progres tagging RO SBKU pada sistem Monev Kemenkeu.

Hambatan/Permasalahan

- 1 Kebijakan efisiensi anggaran (Inpres 1/2025) dan pemblokiran anggaran (*automatic adjustment*) berdampak signifikan pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan dan tertundanya pengajuan RO SBK. Hal ini menyebabkan capaian output belum maksimal, terhambatnya penginputan pada aplikasi SAKTI, serta penurunan nilai IKPA khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA.

- 2 Proses penginputan dan pemantauan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Sekretariat Jenderal belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Kemendiktisaintek.
- 3 Terdapat kendala teknis berupa ketidaksesuaian data Rincian Output (RO) dan kesalahan *tagging* IKP/RO SBK pada aplikasi SAKTI dan Monev Kemenkeu.
- 4 Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA sebagai konsekuensi dari penyesuaian/efisiensi anggaran.
- 5 Penginputan dan pemantauan IKP belum dapat dilakukan karena menunggu pengesahan Renstra Kemendiktisaintek dan Sekretariat Jenderal.
- 6 Perlunya Revisi Informasi Kinerja akibat ketidaksesuaian Rincian Output (RO) serta kesalahan *tagging* IKP dan RO SBK pada aplikasi SAKTI/Monev Kemenkeu.

Strategi/Tindak Lanjut

- 1 Melakukan koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait strategi efisiensi anggaran dan pembukaan blokir, serta melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan. Upaya ini juga mencakup koordinasi dengan DJPb yang menghasilkan pemberian dispensasi nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA untuk Triwulan I 2025.
- 2 Menyelesaikan kendala teknis pada aplikasi SAKTI dan Monev Kemenkeu melalui: Revisi Informasi Kinerja, pemetaan dan *tagging* ulang RO SBK bersama DSP DJA, serta penyesuaian *tagging* IKP yang dikoordinasikan dengan tim Direktorat Sistem Perbendaharaan (DJPb).
- 3 Koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait kebijakan efisiensi, pembukaan blokir anggaran, serta percepatan pelaksanaan kegiatan.
- 4 Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja, pemetaan/tagging RO SBK pada aplikasi Monev, dan penyesuaian IKP pada aplikasi SAKTI bersama unit teknis Kemenkeu (DJA & DJPb).
- 5 Percepatan penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal dan pengawalan usulan RO SBK.

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	693318	PLHAT DATA DAN INFORMASI	0,00	0,00	0,00
2	693318	SEKRETARIAT JENDERAL	94,54	97,81	96,18
3	693318	PLHAT PEMERIKSAAN DAN JASPAS PEMERIKSAAN TIANG	100,00	87,82	94,04

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 3. 16 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 DIPA 693318 Sekretariat Jenderal pada Aplikasi Monev Kemenkeu per 15 Januari 2026



Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi SBSN di Lingkungan Kemdiktisaintek II



Gambar 3. 18 Pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran satuan kerja di Payakumbuh, Sumatera Barat



Gambar 3. 19 Pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran satuan kerja di Payakumbuh, Sumatera Barat

SK 6

Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran Pusat Kemdiktisaintek

Sasaran Kegiatan ini bertujuan menilai apakah suatu proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan berbasis kinerja. Efektivitas perencanaan dan penganggaran tercermin dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan, mulai dari perumusan program dan kegiatan hingga pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan memastikan keselarasan antara kebijakan dan prioritas Kemdiktisaintek, pagu anggaran yang ditetapkan, serta sasaran dan indikator kinerja yang telah dirumuskan. Penyusunan dan penelaahan usulan anggaran dilakukan secara sistematis melalui mekanisme koordinasi antar unit kerja pusat, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan anggaran pada periode sebelumnya menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran, baik dalam penyesuaian program, kegiatan, maupun alokasi anggaran. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran Pusat

Kemdiktisaintek telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen manajemen yang mendukung ketercapaian sasaran kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Satuan Kerja dengan Indeks Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Minimal Baik, dengan target kinerja sebesar 100 persen, yang mencerminkan komitmen organisasi agar seluruh satuan kerja memiliki kualitas perencanaan dan penganggaran yang memadai sebagai prasyarat peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta perbaikan kinerja anggaran secara berkelanjutan.

IKK 6.1

Persentase Satuan Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik

Indikator Persentase Satuan Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik merupakan ukuran strategis kualitas tata kelola. Indikator ini dinilai berdasarkan komponen nilai kinerja perencanaan pada IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), yang meliputi aspek kesesuaian antara rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) dengan realisasi, serta frekuensi revisi anggaran. Dalam hal ini mayoritas Satuan Kerja telah mampu menyusun perencanaan yang presisi dan disiplin, meskipun dihadapkan pada dinamika transisi kelembagaan dan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang mengakibatkan perlunya dilakukan beberapa kali penyesuaian anggaran dalam rangka menjamin ketercapaian program-program prioritas. Kualitas perencanaan yang 'Baik' ini berkontribusi langsung pada efisiensi alokasi anggaran, dan memastikan program prioritas kementerian dapat dilaksanakan tepat waktu.

Untuk menjaga kualitas indeks perencanaan Satker tetap pada kategori 'Baik', telah dilakukan serangkaian langkah strategis berupa penguatan *evidence-based planning*. Upaya ini meliputi:

- a. Memastikan keselarasan antara sasaran strategis, program, kegiatan, dan output.
- b. Menyusun indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (outcome).
- c. Menetapkan alokasi anggaran secara proporsional dan realistis, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pelaksanaan.

- d. Menyusun dan memantau Rencana Penarikan Dana (RPD) secara periodik dalam rangka monitoring dan evaluasi berkala terhadap rencana dan realisasi anggaran.
- e. Melakukan identifikasi dini terhadap potensi kendala pelaksanaan dan menyiapkan langkah mitigasi.
- f. Penerapan penelaahan RKA-K/L yang ketat dengan mewajibkan ketersediaan data dukung (KAK/RAB) yang valid sebelum penetapan DIPA.
- g. Pendampingan teknis (coaching clinic) kepada seluruh Satker untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan anggaran.

Indeks perencanaan dan penganggaran diukur berdasarkan 3 parameter yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Indikator Penilaian IPPN

No	Parameter	Bobot
1	Kesesuaian antara RENJA dan DIPA	20%
2	Konsistensi target prioritas nasional	50%
3	Jumlah revisi DIPA (reguler) yang diproses ke DJA	30%
<i>Total</i>		100%

Untuk mengetahui Indeks perencanaan dan penganggaran, menggunakan rumus berikut ini:

$$IKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan

- a = total unit kerja dengan minimal indeks perencanaan penganggaran tahunan baik
b = total unit kerja Kemdiktisaintek

Tabel 3. 19 Kategori Indeks Perencanaan dan Penganggaran

Nilai	Interpretasi
>90 - 100	Sangat Memuaskan
>80 - 100	Memuaskan
> 70-80	Sangat Baik
>60-70	Baik
>50-60	Cukup (memadai)
>30-50	Kurang
0-30	Sangat Kurang

Perhitungan Indeks Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Penganggaran

1. Kesesuaian Renja dan DIPA

$$K = \left(\frac{\frac{1}{2}(a + b)}{N} \right) \times 100$$

Keterangan

K = Nilai kesesuaian Renja dan DIPA

a = Jumlah RO dengan sasaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

b = Jumlah RO dengan anggaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

N = total RO

2. Konsistensi target program prioritas nasional (antara DIPA Awal dan DIPA Akhir)

$$P = \frac{a}{n} \times 100$$

Keterangan

P = Nilai kesesuaian program Prioritas Nasional

a = Jumlah RO Prioritas Nasional dengan sasaran yang konsisten dari DIPA Awal sampai DIPA akhir

n = jumlah RO Prioritas nasional

Catatan

Khusus untuk Itjen karena merupakan fungsi pengawasan sehingga tidak ada PN maka nilai indikator adalah 100

3. Jumlah revisi DIPA (reguler) yang diproses DJA → standar maksimal revisi 1 tahun sebanyak 4 kali

Untuk jumlah revisi ≤ 4 maka

$$R = 100$$

Untuk jumlah revisi > 4 maka

$$R = \frac{4}{n} \times 100$$

Keterangan

R = Nilai Indikator Revisi

n = Jumlah revisi dalam 1 tahun

Tabel 3. 20 Capaian IKK Persentase Satuan Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik

Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2029
2022	2023	2024	Target PK	Realisasi	%		
88	100	100	100	87	87	100	87

Sumber: Capaian 2022-2024 Data Lakin Biro Perencanaan Kemendikbudristek

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) untuk indikator ini adalah sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai adalah sebesar 87 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 adalah sebesar 87 persen yaitu dalam kategori memuaskan. Nilai Persentase Satuan Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik tahun 2025 belum maksimal karena di tahun 2025 terdapat perubahan sasaran Prioritas Nasional karena adanya penyesuaian anggaran dalam rangka mengakomodasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Program/Kegiatan

- 1 Revisi anggaran khususnya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- 2 Relaksasi efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- 3 Revisi anggaran terhadap perubahan kebijakan Kemdiktisaintek.
- 4 Penyusunan dan penyesuaian referensi informasi kinerja dalam rangka penyelarasan Renja dengan kesesuaian anggaran Unit Kerja Kemdiktisaintek.
- 5 Sosialisasi penggunaan SBKU untuk RO Generik.
- 6 Relaksasi efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tahap II.
- 7 Konsolidasi dan koordinasi kebijakan anggaran Kemdiktisaintek.
- 8 Relaksasi efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tahap III PNB/BLU di PTN.
- 9 Revisi anggaran terhadap perubahan kebijakan seperti pergeseran anggaran dari BA K/L (Kemdiktisaintek) ke BA BUN (Sub BA BUN Belanja Lainnya).

Hambatan/Permasalahan

- 1 Restrukturisasi Kementerian yang sebelumnya Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 Kementerian. Renja K/L DIPA Awal TA 2025 belum mencerminkan kondisi dan kebutuhan anggaran Kemdiktisaintek.
- 2 Perubahan kebijakan Kemdiktisaintek belum mengacu pada Rencana Strategis Kemdiktisaintek yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan.
- 3 Berkurangnya anggaran Kemdiktisaintek sebesar 25% dari total pagu Kemdiktisaintek untuk mendukung program prioritas pemerintah.

- 4 Revisi dalam rangka relaksasi efisiensi anggaran membutuhkan izin Presiden.
- 5 Rencana Strategis Kemdiktisaintek yang disahkan pada akhir tahun mengakibatkan perlunya penyesuaian perencanaan dan penganggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

- 1 Pengusulan Revisi Informasi Kinerja dalam rangka penyesuaian kebijakan Kemdiktisaintek.
- 2 Melakukan identifikasi dan analisis urgensi untuk Program Kemdiktisaintek yang dapat dilakukan relaksasi anggaran.
- 3 Melakukan permohonan relaksasi efisiensi anggaran kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Negara.
- 4 Penyesuaian program dan anggaran berbasis pada Renstra Kemdiktisaintek. .



Gambar 3. 21 Perencanaan dan Anggaran Tahun 2026



Gambar 3. 22 Rapat Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 di Payakumbuh II

B. Realisasi Anggaran

1 Capaian Anggaran

Pada Tahun 2025 Biro Perencanaan dan Kerja Sama belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri, tetapi masih tergabung dalam satu DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 324.002.399.199 atau sebesar 97,58 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 332.044.510.000. Realisasi tersebut bersumber dari Aplikasi Serapan Anggaran (ASGAR) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi per tanggal 19 Januari 2026. Berikut Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi per Kegiatan:

Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	284.837.015.000	279.240.901.239	98,04
Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi	47.207.495.000	44.761.497.960	94,82
Total	332.044.510.000	324.002.399.199	97,58

Sedangkan rincian penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama berdasarkan Rincian Output (RO) teknis yang diampu sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025

No.	Rincian Output (RO)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kerja Sama Antar Lembaga dan Negara	3.717.680.000	3.588.555.792	96,53
2	Layanan Umum	4.161.771.000	4.008.165.000	96,31
3	Akuntabilitas Kinerja	1.097.569.000	1.097.569.000	100,00
4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.680.515.000	1.578.809.100	93,95
5	Sistem Informasi Pemerintahan di Sekretariat Jenderal	175.000.000	163.537.965	93,45
6	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	5.710.476.000	5.710.476.000	100,00
Jumlah		16.543.011.000	16.147.118.757	97,61

Pagu Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja pada tahun 2025.

Tabel 3. 23 Penyerapan Anggaran Pada Tiap Indikator Kinerja Kegiatan Pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	3.892.680.000	3.752.093.757	96,39
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	1.097.569.000	1.097.569.000	100,00
Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	1.379.475.000	1.225.869.000	88,86
Meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	840.257.500	789.407.500	93,95
Meningkatnya tata kelola kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	840.257.500	789.407.500	93,95

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek	Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	8.492.772.000	8.492.772.000	100,00
TOTAL		16.543.011.000	16.147.118.757	97,61

2 Efisiensi Anggaran

a. Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Target	Kinerja	
		Alokasi	Realisasi	%		Realisasi	%
Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	3.892.680.000	3.752.093.757	96,39%	50%	59,73%	119,46%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	1.097.569.000	1.097.569.000	100,00%	81%	76,25%	94,14%
Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	1.379.475.000	1.225.869.000	88,86%	BB	A	150%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	840.257.500	789.407.500	93,95%	83%	90,85%	109,46%
Meningkatnya tata kelola kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	840.257.500	789.407.500	93,95%	Baik	Sangat Baik	120,19%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek	Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	8.492.772.000	8.492.772.000	100,00%	100%	87%	87,00%
TOTAL		16.543.011.000	16.147.118.757	97,61%			
Rata-rata				95,52%			113,4%

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata ketercapaian kinerja pada seluruh indikator mencapai 113,4 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat optimal, bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh koordinasi yang baik serta implementasi strategi



yang tepat. Disisi lain, rata-rata realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja mencapai 95,52% dari total alokasi anggaran yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien.

Perbandingan antara ketercapaian kinerja (113,4%) dan realisasi anggaran (97,61%) menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya, Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kedepan, evaluasi kinerja dan pengelolaan anggaran akan terus ditingkatkan melalui penguatan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan realisasi anggaran dan pencapaian kinerja dapat semakin selaras untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

b. Efisiensi Anggaran

Prinsip Efisiensi dalam penilaian kinerja anggaran adalah memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya. Efisiensi diukur dari penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK. Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kerja Sama berhasil melakukan efisiensi dengan mengoptimalkan Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) menggunakan anggaran yang tersedia. Efisiensi tersebut diperoleh karena Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah menggunakan Rincian Output (RO) SBK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 dan mengoptimalkan pencapaian RO SBK. Nominal efisiensi yang dihasilkan dari upaya tersebut 63,6%.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja organisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Biro secara berkelanjutan mendorong pelaksanaan inovasi, pengelolaan penghargaan, serta penguatan program lintas unit dan kolaboratif. Inovasi diarahkan pada pengembangan sistem dan mekanisme kerja yang adaptif terhadap dinamika kebijakan, khususnya dalam mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan diposisikan sebagai instrumen apresiasi atas kinerja dan kontribusi unit kerja, sekaligus sebagai pemicu peningkatan kinerja berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan program crosscutting dan collaborative dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi antarunit kerja serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program,

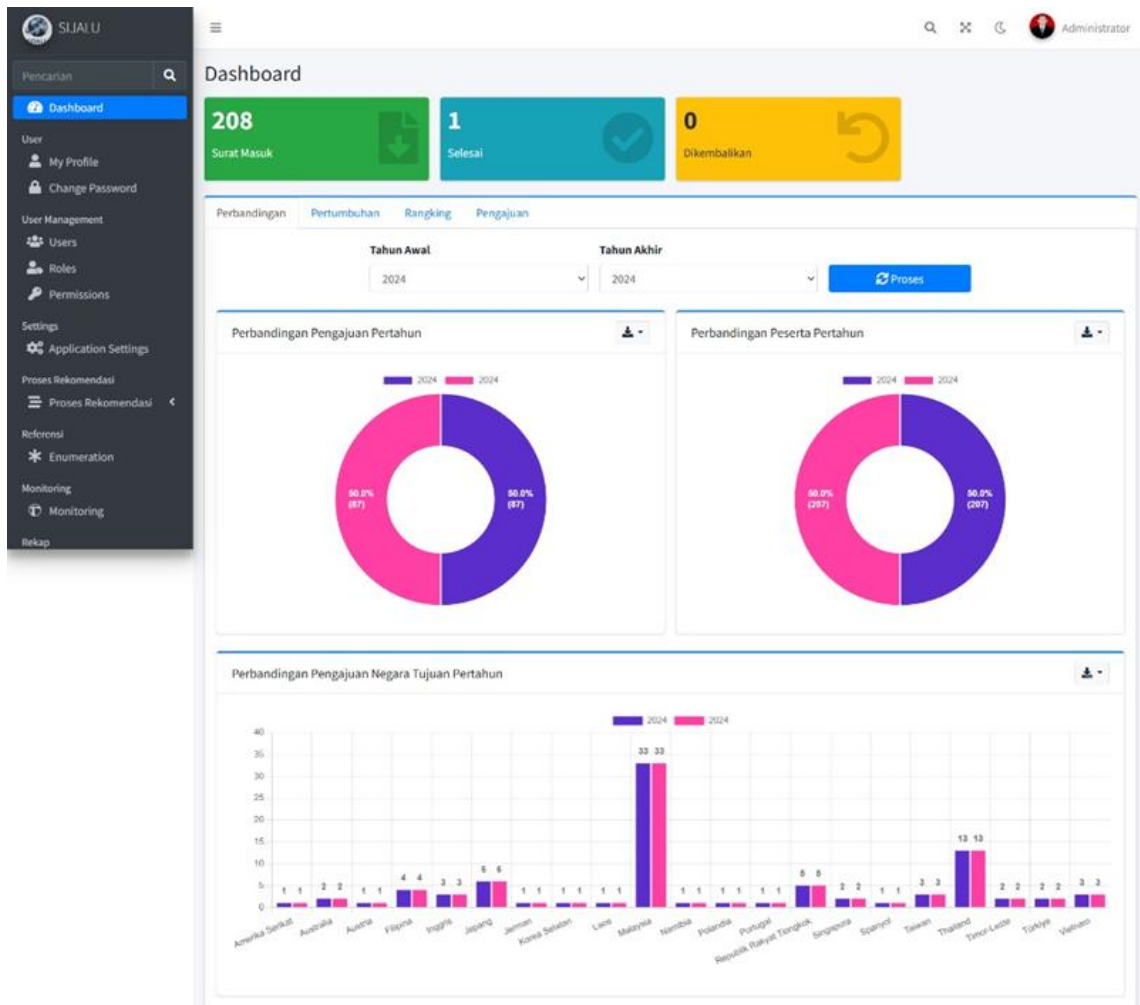
sehingga capaian kinerja biro dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

1 Inovasi

Dalam rangka memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas tata kelola, Biro Perencanaan dan Kerja Sama mengimplementasikan inovasi berbasis digital yang mendukung penguatan pengelolaan kerja sama. Inovasi tersebut meliputi aplikasi perjalanan dinas luar negeri telah dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan kerja sama dalam perizinan perjalanan luar negeri yang masih berada pada tahap pengembangan dan penyempurnaan. Keterbatasan dukungan pembiayaan menyebabkan pemanfaatan aplikasi kerja sama tersebut belum dapat dilakukan secara optimal. Meskipun demikian, inisiatif inovasi ini menunjukkan komitmen Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam mendorong digitalisasi proses bisnis secara bertahap dan berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, serta mendukung pencapaian instansi.

- a. SIJALU merupakan singkatan dari (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri).

Aplikasi SIJALU dirancang dan bersinkronisasi dengan Aplikasi Simpel Setneg yang di miliki oleh Kementerian Sekretaris Negara untuk mendukung pengendalian monitoring perjalanan dinas luar negeri, meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas administrasi dan menjadi basis data terpusat perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kemdiktisaintek. Melalui pemanfaatan SIJALU unit kerja (pemohon) dari perguruan tinggi negeri, Ildikti atau pegawai mengajukan permohonan PDLN melalui sistem, dilengkapi dengan data kegiatan, tujuan, waktu, pembiayaan, dan dokumen pendukung menjadi lebih cepat dan terdokumentasi.



2 Penghargaan

Sepanjang periode pelaporan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama memperoleh berbagai penghargaan yang mencerminkan keberhasilan penguatan Reformasi Birokrasi Tematik dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia berbasis kinerja dan kompetensi. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan integritas, serta internalisasi budaya kerja berorientasi hasil telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan kinerja, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta akuntabilitas pelaporan kinerja. Capaian ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara pengembangan SDM dan peningkatan outcome kinerja organisasi, sehingga memperkuat peran Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam mendukung pencapaian di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dokumentasi berikut menyajikan kegiatan penerimaan penghargaan Biro Perencanaan dan Kerja

Sama sebagai wujud pengakuan atas kinerja organisasi yang didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penerapan tata kelola berbasis kinerja.

- a. English for International Cooperation Management RELO** Program English for International Cooperation diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Biro Kerja Sama Teknis Luar Negeri (Biro KTLN) bekerja sama dengan Regional English Language Office (RELO), Kedutaan Besar AS di Jakarta. Inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas bahasa Inggris para analis kerja sama dan aparatur sipil negara yang terlibat dalam pengelolaan kemitraan internasional Indonesia.



- b. Regional Training in Project Management Asian Development Bank (ADB)** merupakan mitra strategis bagi beberapa kerja sama subregional di Asia dan Pasifik. Berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti sistem manajemen proyek yang lebih baik. Sebagai respons atas tantangan ini, negara-negara anggota bersama sekretariat subregional meminta dukungan ADB untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai desain dan manajemen proyek yang lebih baik.



c. Australia Awards Short Course "*Strengthening Higher Education System in Indonesia*" The Australian National University, Canberra, ACT.

Pada kurun waktu Agustus 2025 hingga September 2025 Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemdiktisaintek diwakili oleh tim Kerja Sama Luar Negeri melalui proses seleksi *by proposal* oleh Pemerintah Australia untuk berpartisipasi dalam Program Australia Awards. Program *short course* ini berjudul "*Strengthening Higher Education System in Indonesia*" yang merupakan sebuah program *short course* bagi para akademisi baik itu dari PTN dan PTS serta pemangku kebijakan di bidang pendidikan tinggi dibiayai oleh Department of Free Trade (DFAT) Pemerintah Australia. Program ini dilaksanakan di Crawford School of Public Policy The Australian National University di Canberra ACT, Australia.



3 Program *Crosscutting/ Collaborative*

Program *Crosscutting/Collaborative* merupakan program kerja sama lintas unit dan/atau lintas instansi yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara terintegrasi. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas melalui kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan. Program kerja sama yang dilakukan diharapkan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pencapaian kinerja organisasi. Program kerja sama yang dilakukan terdiri atas:

- a. Adanya Nota Kesepahaman antara PT PINDAD dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2025 bertempat di Bandung oleh pihak kesatu adalah Perseroan Terbatas yang tergabung dalam Holding Industri Pertahanan Indonesia (*Defend ID*) yang bergerak di bidang manufaktur produk-produk militer berupa produk tempa dan cor, alat dan peralatan kereta api, alat berat, alat dan mesin pertanian, alat dan peralatan kapal laut, kelistrikan serta bahan peledak komersial dan pihak kedua adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pihak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bidang tugasnya memandang perlu menyiapkan suatu landasan kerja sama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan. Salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan begitu juga apabila para pihak sepakat untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau

sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Apabila dipandang perlu terhadap Nota Kesepahaman ini dapat diadakan penambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam bentuk Adendum dan/atau Amandemen.



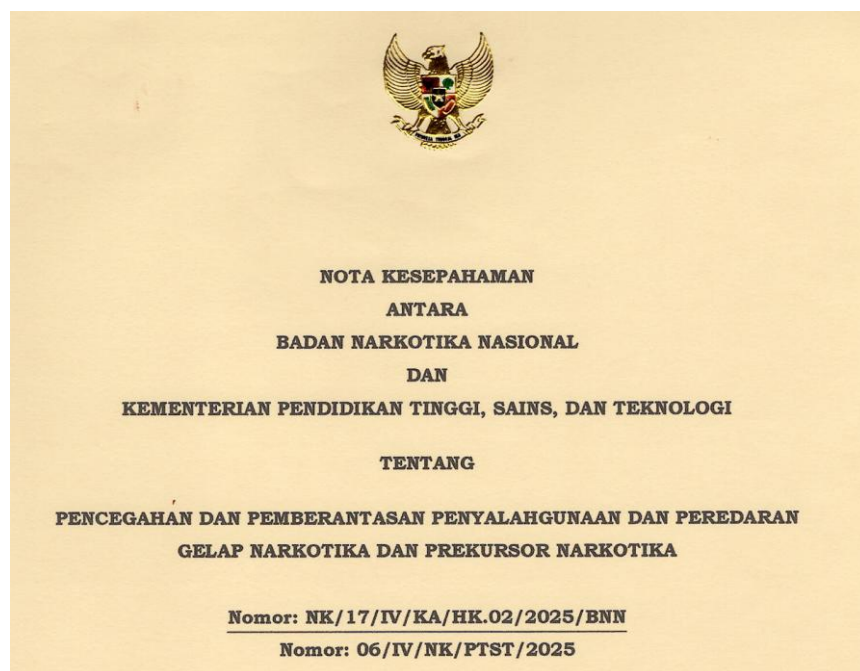
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PINDAD
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN INOVASI

NOMOR: SKB/ 3 / P/BD/DN/III/2025

NOMOR: 03/III/NK/PTST/2025

- b. Adanya Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 15 April 2025 bertempat di Jakarta oleh pihak pertama Lembaga Pemerintah Nonkementerian mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan pihak kedua adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pihak memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi para pihak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan potensi para pihak. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan Nota Kesepahaman ini dapat

diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu dan apabila terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, para pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini. Para pihak melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum).



- c. Adanya Nota Kesepahaman antara Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Dunia Usaha. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2025 oleh Pihak Kesatu adalah asosiasi pengusaha yang merupakan representasi dunia usaha Indonesia dan pihak kedua adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pihak yang terlibat memandang perlu untuk menyiapkan suatu landasan kerja sama dalam rangka pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam dunia usaha. Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tersebut, dimana Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala oleh para pihak paling sedikit 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak dalam bentuk addendum.



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PENDIDIKAN TINGGI, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI
DALAM DUNIA USAHA

NOMOR : 259/DPN/1.6/5B/V/25
NOMOR : 15/V/NK/PTST/2025



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

RINGKASAN KINERJA

Sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025, secara umum target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai, dengan rangkuman sebagai berikut.



97,58%

Pagu	Rp332.044.510.000
Realisasi	Rp324.002.399.199

LANGKAH KERJA KE DEPAN

- 1 Merespons dinamika penurunan Indeks Kualitas Perencanaan pada masa transisi, Biro Perencanaan dan Kerja Sama akan melaksanakan program pendampingan yang lebih terstruktur dan masif.
- 2 Redesain Penganggaran Berbasis *Quality of Spending* dan Prioritas Nasional.
- 3 Untuk mengatasi kendala keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian data capaian output, langkah strategis ke depan adalah mengintegrasikan sistem data internal dengan aplikasi SAKTI dan Monev Kemenkeu (SMART DJA).

- 4 Dalam aspek kerja sama, fokus ke depan adalah merevitalisasi tata kelola kemitraan perguruan tinggi untuk mendukung target *World Class University*. Biro akan menyederhanakan proses bisnis perizinan kerja sama luar negeri (KSLN) dan memfasilitasi *matching fund* dengan mitra industri global.
- 5 Biro Perencanaan dan Kerja Sama akan memfasilitasi peningkatan standar akuntabilitas di seluruh satuan kerja dengan memperkuat implementasi SAKIP yang substansial, bukan sekadar formalitas pelaporan. Upaya ini mencakup pendampingan berkelanjutan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) yang jujur dan transparan, di mana hasil evaluasi periode berjalan secara konsisten digunakan sebagai *feedback* untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan anggaran di masa depan.

The background of the page is a light gray architectural wireframe of a building's interior, showing a grid of columns and beams. Overlaid on this are several large, semi-transparent geometric shapes: blue and yellow circles and abstract shapes in the corners. The word "LAMPIRAN" is centered in a bold, dark blue font.

LAMPIRAN

Lampiran

A Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

1 Perjanjian Kinerja Awal



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Sunarya Sulaeman
Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Togar Mangihut Simatupang
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 27 Oktober 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Togar Mangihut Simatupang

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan
Kerja Sama
Agus Sunarya Sulaeman

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	%	50
[SK 2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 2.1] Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	%	81
[SK 3] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Predikat	BB
[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 4.1] Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	%	83
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	[IKK 5.1] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Kategori	Baik
[SK 6] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek	[IKK 6.1] Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	100

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7721	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	Rp274.337.015.000
2	7722	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi	Rp47.207.495.000
Total Anggaran			Rp321.544.510.000

Catatan : Anggaran dan Kegiatan Berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Tohar Mangihut Simatupang

Jakarta, 27 Oktober 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 Agus Sunarya Sulaeman



Catatan :
 - UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya menggunakan alat bukti elektronik yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



2 Perjanjian Kinerja Akhir



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Faisal
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Togar Mangihut Simatupang
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Togar Mangihut Simatupang

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Ade Faisal



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	%	50
[SK 2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 2.1] Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	%	81
[SK 3] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Predikat	BB
[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 4.1] Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	%	83
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal	[IKK 5.1] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Kategori	Baik
[SK 6] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek	[IKK 6.1] Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	100

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7721	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	Rp284.837.015.000
2	7722	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pdayagunaan Teknologi Informasi	Rp47.207.495.000
Total Anggaran			Rp332.044.510.000

Catatan : Anggaran dan Kegiatan Berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Togar Mangihut Simatupang

Jakarta, 29 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 Ade Falsal



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



B Pengukuran Kinerja

1 Triwulan I



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama				
[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	50	%	12	12
[SK 2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
[IKK 2.1] Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	81	%	0	0
[SK 3] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	BB	Predikat	-	--
[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
[IKK 4.1] Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	83	%	0	0
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 5.1] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Baik	Kategori	-	-
[SK 6] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdikstisaintek				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2 Triwulan II



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan II
Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama				
[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	50	%	23	23
[SK 2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
[IKK 2.1] Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	81	%	0	0
[SK 3] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	BB	Predikat	-	-
[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
[IKK 4.1] Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	83	%	0	0
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 5.1] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Baik	Kategori	-	-
[SK 6] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



3 Triwulan III



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan III Biro Perencanaan dan Kerja Sama Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama				
[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	50	%	30	30
[SK 2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
[IKK 2.1] Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	81	%	0	0
[SK 3] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	BB	Predikat	-	-
[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
[IKK 4.1] Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	83	%	0	0
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 5.1] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Baik	Kategori	-	-
[SK 6] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



4 Triwulan IV



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan IV
Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama				
[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral	50	%	50	59.73
[SK 2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
[IKK 2.1] Persentase satuan kerja dengan Predikat SAKIP Minimal A	81	%	81	76.25
[SK 3] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Kerja Sama	BB	Predikat	BB	A
[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
[IKK 4.1] Persentase satuan kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Baik	83	%	83	90.85
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal				
[IKK 5.1] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Jenderal	Baik	Kategori	Baik	Sangat Baik
[SK 6] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemdiktisaintek				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja dengan Indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	100	%	100	87

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



C Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

**Pernyataan Telah Direviu
Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Tahun Anggaran 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Biro Perencanaan dan Kerja Sama untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Januari 2026
Ketua Tim Reviu,



Firman Hidayat



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

